

**PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN,  
KARAKTER EKSEKUTIF DAN KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



Oleh :

**SARLEN**

**1901036020**

**S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif,  
dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran  
Pajak  
Nama Mahasiswa : Sarlen  
NIM : 1901036020  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 18 Desember 2023

Pembimbing,



Mega Norsita, S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 196205121988112001


**Lulus Tanggal Ujian: 11 Desember 2023**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif,  
dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran  
Pajak  
Nama Mahasiswa : Sarlen  
NIM : 1901036020  
Hari : Senin  
Tanggal Ujian : 11 Desember 2023

**TIM PENGUJI**

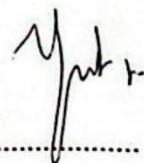
1. Mega Norsita, S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19910607 201903 2 000

1.....  


2. Dr. Cornelius Rantelangi, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., CTA.,  
CSRS., BKP  
NIP. 19620414 198803 1007

2.....  


3. Yunita Fitria, S.E., M.Sc., CSRS., CSRA  
NIP. 19860606 201504 2 001

3.....  


## ABSTRAK

Sarlen. **Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)**. Dibimbing oleh Ibu Mega Norsita. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 126 data perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 -2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Penghindaran Pajak

## **ABSTRACT**

Sarlen. *The Effect of Independent Commissioners, Executive Character, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector on the Indonesia Stock Exchange in 2018 – 2022)*. Supervised by Mrs. Mega Norsita. This study aims to examine the effect of independent commissioners, executive character, and institutional ownership on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 – 2022. This type of research is quantitative research using secondary data. Sampling was determined using the purposive sampling method and obtained as many as 126 data on manufacturing companies in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The results of this study show that independent commissioners have a negative effect on tax avoidance, executive character has a positive effect on tax avoidance, and institutional ownership has no effect on tax avoidance.

**Keywords:** *Independent Commissioner, Executive Character, Institutional Ownership, Tax Avoidance*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, Saya bersedia skripsi dan Gelar Sarjana atas nama Saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 28 November 2023



Sarlen

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarlen

Nim : 1901036020

Program Studi : S1-Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada UPT Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Fee Right) atas skripsi ini dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini kepada UPT Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (datbase), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 18 Desember 2023

Yang menyatakan,



Sarlen

## RIWAYAT HIDUP



**Sarlen**, lahir di Mara Satu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada tanggal 12 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Lencau Idin (Alm) dan Ibu Sermia Ilong. Penulis memulai pendidikan formal pada jenjang dasar di SD Negeri 001 Tanjung Palas Barat dan lulus pada tahun 2013. Kemudian, melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 Kayan Hulu dan lulus pada tahun 2016. Lalu, melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2019.

Penulis kembali melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi pada tahun 2019 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022, Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Angkatan 48 Universitas Mulawarman bertempat di Desa Muhur, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 18 Desember 2023

Sarlen



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala anugerah dan kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA., CSRS selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak.,CA.,CMA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Koordinator Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Ibu Mega Norsita, S.E.,M.Acc.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasihat, serta dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Aspyan Noor, S.E., M.E selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pelayanan dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta yaitu Bapak Alm Lencau Idin, Ibu Sermia Ilong, Bapak Rustam Marten dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan penuh baik secara materi maupun non materi, serta semangat dan doa yang telah diberikan.
9. Keluarga rohani yang selalu memberikan dukungan dan doanya hingga saat ini Rina Maulani Putri, Bennetsia Hasibuan, Meta Soledea Ginting, Jenny Erisanthia dan Silvani Irin.
10. Kawan seperjuangan Sisilia Meldayani, Pelis Nurpisma, Arex Rolando Gala, Mikha Galo Patibong dan Budi Santoso yang menemani selama masa perkuliahan dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat perantauan Souyen Remilan, Jane Apriesta, Selviani Lewi terima kasih sudah menjadi tempat keluh kesah dan pemberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seluruh keluarga besar Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen FEB-UNMUL yang telah memberikan pengalaman berharga selama berada di LKPMK.

13. Seluruh keluarga besar *Connect Group Youth* 11 & 41 GMS terima kasih atas teladan yang diberikan serta dukungan doa dan semangat hingga saat ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan, dukungan dan kerjasama selama menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dan banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Apabila ada saran dan masukan atas skripsi ini penulis terima secara terbuka dan dengan ucapan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Samarinda, 16 November 2023



Sarlen

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Teori Agensi ( <i>Agency Theory</i> ) .....	11
2.2. Penghindaran Pajak .....	12
2.2.1. Komisaris Independen.....	14
2.2.2. Karakter Eksekutif.....	16
2.2.3. Kepemilikan Institusional .....	17
2.3. Penelitian Terdahulu .....	19
2.4. Kerangka Konseptual .....	21
2.5. Pengembangan Hipotesis .....	23
2.5.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak .....	23

2.5.2. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak ..	25
2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak ..	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1. Definisi Operasional.....	29
3.1.1. Variabel Terikat ( <i>dependent variable</i> ) .....	29
3.1.2. Variabel Bebas ( <i>independent variable</i> ).....	30
3.2. Populasi dan Sampel .....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.5. Alat Analisis Data .....	36
3.5.1. Statistik Deskriptif.....	36
3.5.2. Uji Kelayakan Model .....	36
3.5.3. Uji Asumsi Klasik .....	37
3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda .....	40
3.5.5. Uji Hipotesis (Uji t).....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	38
4.2. Analisis Data .....	39
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	39
4.2.2. Uji Kelayakan Model .....	40
4.2.3. Uji Asumsi Klasik .....	41
4.2.4. Analisis Linier Berganda.....	45
4.2.5. Uji Hipotesis (Uji t).....	47
4.3. Pembahasan .....	48
4.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak .....	48
4.3.2. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak ..	50
4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran .....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 3.2 Kriteria Sampel Penelitian .....	33
Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian .....	40
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji F.....	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas .....	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	45
Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	47
Tabel 4.8 Hasil Analisis Linier Berganda .....	48
Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Karakter Eksekutif (Nominal) .....	53

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	23
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	28
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. ....	63
Lampiran 2. Data Penghindaran Pajak.....	64
Lampiran 3. Data Komisaris Independen.....	67
Lampiran 4. Data Karakter Eksekutif .....	70
Lampiran 5. Data Kepemilikan Institusional .....	73
Lampiran 6. Data Perbandingan Karakter Eksekutif .....	76
Lampiran 7. Data <i>Outlier</i> .....	80
Lampiran 8. <i>Output</i> SPSS .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap tahun pengembangan ekonomi Indonesia membutuhkan sejumlah dana yang substansial guna memastikan kesuksesan perekonomian nasional. Sumber dana yang signifikan ini umumnya berasal dari pencapaian target penerimaan negara dalam setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pendapatan negara terdiri dari atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Pajak menjadi penerimaan terbesar dalam pendapatan negara yaitu, Rp1.717,8 triliun dari total pendapatan negara Rp2.626,4 triliun dalam APBN 2022 (Kementerian Keuangan, 2023). Penerimaan tersebut digunakan sebagai pembiayaan bagi pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia sangat bergantung pada pendapatan pajak. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan pajak dari tahun ke tahun.

Perusahaan memainkan peran signifikan dalam kontribusi penerimaan pajak. Sebagai pihak yang memiliki kontribusi besar, hampir semua perusahaan dalam menjalankan bisnisnya pasti menginginkan laba yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Biasanya perusahaan akan berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin. Hal ini tentu bertentangan dengan pemerintah yang selalu mengoptimalkan penerimaan pajak negara setiap tahunnya. Dampak dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menyebabkan

terjadinya dugaan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan pajak.

Dalam analisis “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*”, terungkap bahwa Indonesia mengalami dampak finansial yang signifikan akibat praktik penghindaran pajak. Adanya perkiraan kerugian sekitar US\$4,86 miliar atau sekitar Rp67,6 triliun menandakan bahwa mayoritasnya berasal dari upaya penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di sisi lain, kontribusi sekitar US\$78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak individu (Sukmana, 2020).

Perusahaan di Indonesia, seperti yang terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama Tbk pada tahun 2019, terlibat dalam praktek penghindaran pajak. Kasus ini mencakup penerapan strategi penghindaran pajak di sektor barang konsumsi. PT Bentoel Internasional Investama, sebagai anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT), dilaporkan oleh lembaga *tax justice* karena menerapkan taktik penghindaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan disebut menggunakan berbagai metode penghindaran pajak, termasuk melakukan pembayaran bunga utang internal perusahaan, royalti, ongkos, dan biaya teknologi informasi. Strategi penghindaran pajak ini melibatkan pergeseran transaksi melalui anak perusahaan yang dimiliki, dengan memanfaatkan keuntungan dari negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia. Selain itu, disampaikan bahwa BAT juga tercatat melakukan pinjaman dana dari Jersey melalui perusahaan entitas di Belanda, sebagai upaya strategis guna menghindari pemotongan pajak terhadap pembayaran bunga kepada pihak yang bukan warga negara.

Awalnya, Indonesia memberlakukan pengurangan pajak senilai 20%, tetapi setelah mencapai kesepakatan dengan Belanda, tarif pajak akhirnya menjadi nol. Bentoel mencatat pembayaran beban bunga utang dan royalti kepada perusahaan dengan kepemilikan yang serupa sejumlah US\$164 juta atau sekitar Rp2,25 triliun. Di samping itu, terdapat pengeluaran untuk biaya ongkos dan teknologi informasi yang ditujukan kepada perusahaan induk, yaitu BAT, yang menyebabkan Bentoel mengalami penurunan sekitar 27% pada hasil keuangannya. Walaupun peraturan di Indonesia mengharuskan tarif pajak 25% untuk pembayaran ongkos, biaya teknologi informasi (IT) dan royalti, Bentoel berhasil mengatasi hal tersebut dengan membayar pada sebagian perusahaan turunan BAT di Inggris. Keuntungan ini tercapai melalui perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris, sehingga pembayaran terkait ongkos, biaya teknologi informasi (IT) dan royalti dikenakan pajak senilai 15%. Akibat dari skema tersebut, penerimaan pajak Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$13,7 juta per tahun (Mahadi, 2019).

Upaya untuk mengurangi kewajiban pajak yang diperbolehkan oleh hukum, yang melibatkan pemanfaatan celah-celah dalam peraturan, disebut sebagai penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Mita Dewi, 2019). Penghindaran pajak secara hukum tidak dilarang namun praktik ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena akan memengaruhi jumlah penerimaan pajak (Lukito & Oktaviani, 2022). Fenomena yang terjadi adalah perusahaan atau wajib pajak badan melakukan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak, sehingga total pembayaran pajak kepada negara dapat dikurangi tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adanya keberadaan seorang komisaris independen berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan. Seorang anggota dewan komisaris independen di dewan direksi tidak terikat dalam hubungan timbal balik dengan anggota direksi, pemegang saham pengendali, atau lembaga pengawas lainnya. Di samping itu, komisaris independen juga tidak menduduki posisi sebagai direktur perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemilik bisnis. (Zemzem *et al.*, 2013). Komisaris independen menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Adanya komisaris independen pada suatu perusahaan bertujuan sebagai penyeimbang antara pemegang saham pengendali maupun non pengendali dalam pengambilan keputusan. Keberadaan dewan komisaris independen tidak hanya mencerminkan efisiensi pemantauan terhadap kinerja direksi, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dengan melibatkan lebih banyak komisaris independen, perusahaan dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola aspek-aspek bisnis. Peningkatan tingkat pengawasan dapat memacu manajer suatu perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan keputusan, khususnya dalam merancang strategi pengurangan kewajiban pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noorica & Asalam (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan studi lain menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen

berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Namun, penelitian Fitria (2018) menunjukkan adanya seorang komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor kedua yang memengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak yaitu karakter eksekutif. Penghindaran pajak seringkali terjadi karena kebijakan yang diterapkan oleh kepemimpinan perusahaan. Sebagai penentu keputusan dan kebijakan di tingkat eksekutif, para eksekutif memiliki beragam karakter dalam melaksanakan tugas mereka, seperti *risk taker* dan *risk averse* (Syahrudin *et al.*, 2020). Perusahaan yang memiliki eksekutif berkarakter *risk taker* biasanya cenderung memiliki karakter pengambil keputusan berisiko, dimana eksekutif akan lebih berani dalam membuat kebijakan dengan risiko tinggi. Pemimpin yang memiliki sifat berani mengambil risiko dapat melakukan strategi penghindaran pajak yang berpotensi menyebabkan perusahaan diselidiki secara hukum, yang mungkin merugikan reputasi perusahaan jika tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan cara yang agresif dan melanggar hukum (Pratomo & Triswidyaria, 2021). Namun, bila sebuah organisasi dipimpin oleh eksekutif yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*), kemungkinan besar enggan mengambil keputusan berisiko tinggi dan kurang berani untuk merumuskan kebijakan yang dapat berdampak besar. Oleh karena itu, eksekutif akan berupaya untuk menghindari praktik pengurangan pajak (Pratomo & Triswidyaria, 2021).

Penelitian Feranika (2017) mengambil kesimpulan bahwa karakter eksekutif yang semakin tinggi atau bersifat *risk taker* turut melakukan penghindaran pajak. Hasil ini senada dengan temuan Lukito & Oktaviani (2022),

yang juga mengindikasikan bahwa karakter eksekutif memberikan pengaruh positif dalam praktik penghindaran pajak. Namun, temuan yang berbeda muncul dalam penelitian oleh Noorica & Asalam (2021), yang menjelaskan bahwa upaya penghindaran pajak justru dipengaruhi secara negatif oleh karakter eksekutif. Sebaliknya, Ekaputra Tj *et al.*, (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu dibebberapa penelitian faktor karakteristik kepemilikan perusahaan juga dapat memengaruhi adanya penghindaran pajak. Perusahaan memiliki berbagai bentuk kepemilikan, di antaranya adalah kepemilikan institusional, yang mencirikan persentase saham dimiliki oleh lembaga pada akhir tahun (Simarmata & Cahyonowati, 2014). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengawasan secara optimal dan mengurangi peluang manajer perusahaan untuk bersikap oportunistik serta mempengaruhi berbagai tindakan maupun kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan seperti tindakan untuk mengurangi beban pajak yang timbul dan pajak yang dilakukan secara agresif. Semakin besar kepemilikan institusi terhadap saham, semakin kuat kontrol terhadap manajerial dengan demikian, dapat mengurangi potensi konflik keagenan dan peluang penghindaran pajak. (Wijayanti & Merkusiwati, 2017).

Penelitian Mita Dewi (2019) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan institusional. Sebaliknya, dalam penelitian Afrika (2021) disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, Hidayat *et*

*al.*, (2022) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Peran vital komisaris independen adalah memantau tindakan manajemen. Kehadiran komisaris independen membantu memastikan bahwa segala informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemilik perusahaan adalah akurat. Dengan adanya komisaris independen dapat membantu mengatasi terjadinya asimetri informasi yang timbul dari ketidaksesuaian dan penyimpangan praktik perusahaan. Karakter eksekutif memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan strategis dan operasional. Kebijakan perpajakan seringkali berkaitan dengan keputusan finansial yang signifikan. Karakter eksekutif yang memiliki insentif tertentu (misalnya opsi saham) mungkin memiliki pengaruh dalam praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional cenderung memiliki tujuan jangka panjang dan kepentingan pemegang saham. Entitas institusional yang memiliki kepemilikan dapat membantu memantau dan mengawasi praktik perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak, untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan menjadi isu yang semakin relevan dalam lingkungan bisnis dan regulasi saat ini. Melibatkan variabel-variabel seperti komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana perusahaan mengelola praktik penghindaran pajak dalam konteks dinamika tata kelola modern.

Penelitian ini membahas mengenai penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia



dalam rentang waktu 2018-2022. Alasan peneliti menggunakan sektor barang konsumsi karena cukup menarik, dimana seluruh produknya selalu dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan Indonesia saat ini memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga permintaan akan terus bertambah dan akan berdampak pada laba yang diperoleh serta berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan. Terdapat enam sub sektor dalam industri barang konsumsi, termasuk sub sektor makanan dan minuman, rokok, farmasi, produk kecantikan dan keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga, dan sub sektor barang konsumsi lainnya.

Selain itu kasus penghindaran pajak juga banyak terjadi pada sektor industri barang konsumsi, selain yang telah disebutkan diatas kasus PT Bentoel Investama, kemudian dilansir pada [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) PT Indofood Sukses Makmur tahun 2015 melakukan pendirian perusahaan baru lalu mengalihkan aset dan liabilitasnya, kemudian pada PT Unilever Tbk melakukan transfer pricing pada tahun 2015, kemudian pada PT Waskita karya tahun 2018 melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan modal yang berasal dari utang atau pinjaman.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti pada beberapa studi sebelumnya, ditemukan perbedaan hasil dalam berbagai penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini memicu minat penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut, dan inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat topik tersebut dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Selain memiliki tujuan penelitian tentunya suatu penelitian perlu memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang, sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan mendorong penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris bagi perusahaan tentang komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 2) Bagi calon investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi calon investor dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan tertentu dan menjadi pengawasan agar perusahaan membayar pajak dengan baik dan benar serta transparan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori agensi yang dipelopori oleh Jensen & Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*) dapat dipahami sebagai suatu kontrak. Kontrak kerja ini dirancang untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab *principal* serta *agent*, yang didasarkan pada kesepakatan bersama. *Principal* memiliki kewenangan guna memberikan otorisasi kepada *agent* untuk menjalankan tugasnya sebagai manajemen yang mengatur dan mewujudkan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang *principal* inginkan.

Teori agensi didasarkan pada keyakinan bahwa manusia secara alamiah cenderung untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi. Dalam konteks manajemen, asumsi ini menyiratkan bahwa manajer, sebagai *agent*, mungkin bersikap *opportunistic* dengan mengutamakan kepentingan pribadinya. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah menghindari beban pajak tinggi. Sebagai perwakilan di dalam korporasi, manajer memperoleh pengetahuan yang lebih banyak mengenai operasional perusahaan dibandingkan dengan pihak *principal*. Dalam situasi di mana *principal* tidak dapat selalu memantau secara langsung kegiatan perusahaan, *agent* dapat menggunakan pengetahuannya untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau manajemen laba. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak yang tinggi dan pada akhirnya memaksimalkan

kesejahteraannya. Penyimpangan informasi yang terjadi diantara *principal* dan *agent* menimbulkan ketidakseimbangan yang disebut sebagai asimetri informasi, yang pada dasarnya merujuk pada ketidaksetaraan informasi antara pihak yang memberikan arahan (*principal*) dan pelaksana tugas (*agent*).

Dalam penelitian ini, teori agensi dianggap sangat relevan dalam konteks tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Asimetri informasi yang ada mendorong perusahaan atau manajer sebagai *agent* untuk bersikap oportunistik guna mencapai penghindaran pajak

Untuk mengurangi kemungkinan praktik-praktik tidak etis, terutama terkait penghindaran pajak, diperlukan kehadiran komisaris independen dalam struktur perusahaan. Komisaris independen memiliki peran dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan dan memastikan bahwa praktik perpajakan tidak bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan yang tidak lepas dari karakter yang dimiliki eksekutif, karena hak yang dimiliki pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan dapat mendorong para eksekutif diperusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang besar dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional di dalam perusahaan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen.

## **2.2. Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak atau yang dikenal sebagai *tax avoidance* adalah suatu upaya yang tidak melanggar hukum, tetapi merupakan usaha untuk mengurangi

kewajiban pajak dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana wajib pajak memanfaatkan celah-celah regulasi yang tersedia. Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dengan memanfaatkan peluang pada peraturan pajak tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak tidak dinyatakan sebagai suatu pelanggaran yang dilarang, sebab hal tersebut merupakan upaya untuk meringkankan beban pajak dengan memanfaatkan metode yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum perpajakan. Namun, perlu ditekankan bahwa pemerintah kurang mendukung praktik penghindaran pajak ini, sebab akibatnya dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh negara melalui sektor pajak.

Pajak merupakan beban finansial yang cukup besar bagi perusahaan dan berkontribusi pada pengurangan arus kas yang dapat digunakan oleh perusahaan dan para pemegang saham. Situasi ini memberikan motivasi kepada perusahaan untuk mencari cara dalam mengurangi besaran pajak melalui praktik penghindaran pajak (Chen *et al.*, 2010). Upaya yang sering diterapkan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai target laba yang diinginkan adalah melalui praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan berusaha mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam buku karangan Parjiono *et al.*, (2018) penghindaran pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Penghindaran pajak yang diizinkan (*acceptable tax avoidance*)

Suatu skema dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diizinkan untuk dilakukan atau sesuai dengan peraturan tujuan usaha yang baik dan tidak terlibat dalam transaksi yang direkayasa.

## 2. Penghindaran pajak tidak diizinkan (*unacceptable tax avoidance*)

Suatu skema dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak diizinkan untuk dilakukan atau tidak sesuai dengan peraturan tujuan usaha yang baik dan semata mata untuk menghindari pajak dengan melakukan transaksi yang direkayasa sehingga menimbulkan kerugian.

### **2.2.1. Komisaris Independen**

Komisaris independen merujuk kepada individu dalam dewan komisaris perusahaan yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan manajemen operasional perusahaan. Keberadaan komisaris independen untuk membawa perspektif yang obyektif dan bebas dari konflik dalam pengawasan terhadap keputusan dan kebijakan perusahaan. Komisaris independen biasanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidang hukum, keuangan, atau manajemen.

Komisaris independen merupakan individu yang secara menyeluruh tidak terikat dalam berbagai aspek yang bersinggungan dengan manajemen, pemegang saham pengendali, dan anggota dewan komisaris lainnya. Selain itu, tidak memiliki keterkaitan relasi bisnis atau hubungan lainnya yang berpotensi memengaruhi kapabilitas untuk mengambil tindakan secara mandiri demi integritas perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan komisaris independen

memiliki fungsi untuk mengawasi dan memberikan saran kepada manajemen perusahaan. Selain itu, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah mencapai standar tata kelola perusahaan yang baik (Pratiwi *et al.*, 2016). Sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/Pojk.04/2017, total komisaris independen dalam dewan direksi perusahaan harus mencapai paling sedikit 30% dari total anggota komisaris. Hal ini menjadi indikator bahwa jika jumlah komisaris independen lebih dari 30% maka *good corporate governance* telah dijalankan dengan baik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) terdapat beberapa kriteria esensial yang harus terpenuhi untuk menegakkan status sebagai seorang komisaris independen dalam struktur korporat suatu entitas perusahaan, yaitu:

- a. Abai dari segala bentuk keterkaitan dengan pihak pemegang saham yang mendominasi dan mengendalikan kebijakan strategis perusahaan bersangkutan.
- b. Tidak melibatkan diri dalam hubungan apapun dengan direktur utama ataupun pengawas direktur lainnya yang bersifat potensial merintang atau merusak independensi dan integritasnya di dalam perangkat kepengurusan perusahaan terkait.
- c. Menjauhi posisi kepengurusan sebagai direktur di badan usaha afiliasi yang memiliki keterkaitan dengan entitas perusahaan yang bersangkutan.
- d. Tidak memegang jabatan manajerial serta tidak menjalin interaksi bisnis yang signifikan dengan perusahaan tersebut atau badan usaha afiliasinya dalam rentang waktu tiga tahun terakhir.



- e. Tidak menjadi mitra usaha atau klien dalam kerangka perusahaan konsultan yang memberikan layanan profesional kepada perusahaan tersebut atau badan usaha afiliasi yang terkait.
- f. Bebas sepenuhnya dari segala kepentingan, aktivitas usaha, atau hubungan lainnya yang mungkin dianggap sebagai penghalang atau pengurang potensi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir secara bebas dan mandiri demi menjaga kepentingan keseluruhan entitas perusahaan.
- g. Memiliki pemahaman mendalam terkait Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perusahaan publik, Undang-Undang Pasar Modal, serta seluruh peraturan yang relevan dan terkait yang berlaku.

### **2.2.2. Karakter Eksekutif**

Seorang eksekutif adalah individu yang menduduki peran sentral dalam kepemimpinan perusahaan. Menurut Low (2006) pemimpin perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif dikatakan memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* dilihat berdasarkan setiap keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan. Jika keputusan yang diambil beresiko, maka menunjukkan pemimpin berkarakteristik *risk taker*. Sementara itu, apabila seorang pemimpin memiliki keberanian yang terbatas dalam mengambil keputusan di lingkungan bisnis, hal ini mencerminkan sifat *risk averse*.

Seorang eksekutif yang bersifat *risk taker* atau pengambil risiko umumnya lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Umumnya, didorong oleh dorongan yang mendalam untuk meraih peningkatan pendapatan, status,

kesejahteraan pribadi, dan tingkat otoritas. Dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan, eksekutif dengan sifat *risk taker* biasanya tidak segan untuk melakukan pembiayaan melalui utang (Feranika, 2017).

Eksekutif yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*) memiliki kecenderungan kurang menyukai situasi-situasi yang melibatkan risiko, sehingga sering kali enggan mengambil keputusan yang berisiko dalam konteks bisnis (Kartana & Wulandari, 2018). Individu eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* umumnya menunjukkan ciri-ciri usia yang lebih tua, telah menjabat dalam posisi manajerial untuk jangka waktu yang cukup lama, dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja (Oktamawati, 2017). Menurut Butje & Tjondro (2014), Seseorang yang memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko cenderung menjauhi setiap jenis peluang yang mungkin menimbulkan risiko, dan lebih mengalokasikan sebagian besar dari aset mereka ke dalam investasi yang dianggap relatif aman, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian finansial. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan utang, mengatasi ketidakpastian terkait tingkat pengembalian, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan investasi.

### **2.2.3. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional mengacu pada sejumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan atau institusi, termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi, yayasan, bank, perusahaan investasi, dan perusahaan berbentuk perseroan (PT) dan entitas institusi lainnya. Persentase kepemilikan

institusional, umumnya digunakan sebagai indikator, memberikan gambaran sejauh mana lembaga-lembaga keuangan tersebut memiliki saham dalam struktur kepemilikan suatu perusahaan. Menurut Faisal (2005), peran pengawasan oleh pemegang saham institusional menjadi semakin krusial dengan meningkatnya kepemilikan institusi, khususnya ketika kepemilikan tersebut mencapai lebih dari 5% memiliki kapabilitas yang cukup besar dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas manajemen perusahaan.

Kepemilikan institusional bukan hanya sekadar kepemilikan saham, tetapi juga merupakan mekanisme efektif untuk mendorong pengawasan yang efektif terhadap langkah-langkah manajerial. Besarnya investasi oleh pihak institusional menjadi penentu utama sejauh mana tingkat pengawasan dapat diterapkan. Semakin besar kepemilikan saham institusional dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, semakin besar pula kemampuan institusi tersebut untuk mengawasi dan memotivasi manajemen perusahaan agar menghindari tindakan yang dapat merugikan para pemegang saham.

Menurut Wahyudi & Pawestri (2006), kepemilikan institusional mencakup seberapa besar porsi saham yang dimiliki oleh entitas institusi dalam suatu perusahaan pada akhir periode tertentu. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan memberikan kontrol eksternal yang signifikan. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen perusahaan akan merancang strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Pemegang saham eksternal memiliki motivasi untuk melakukan pemantauan aktif dan memberikan pengaruh yang sesuai terhadap manajemen, dengan tujuan melindungi investasi mereka dalam

perusahaan. Keberadaan pemegang saham eksternal dapat mengurangi perilaku oportunistik dari pihak manajemen.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Hidayat <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Perusahaan</li> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Komisaris Independen Publik</li> </ul> Variabel terikat (dependen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Lukito & Oktaviani (2022)	Pengaruh <i>Fixed Asset Intensity</i> , Karakter Eksekutif, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fixed Asset Intensity</i></li> <li>• Karakter eksekutif</li> <li>• <i>Leverage</i></li> </ul> Variabel terikat (dependen)           Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel <i>fixed asset intensity</i> dan <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara variabel karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3	Afrika (2021)	Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> </ul> Variabel terikat (dependen)           Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Lanjutan tabel 2.1.

4	Noorica & Asalam (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Kepemilikan Manajerial</li> <li>• Karakter eksekutif</li> </ul> Variabel terikat (dependen) <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, variabel karakter eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap upaya penghindaran pajak.
5	Pratomo & Risa Aulia Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Komite Audit</li> </ul> Variabel terikat (dependen) <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6	Mita Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Dewan Komisaris Independen</li> <li>• Komite Audit</li> </ul> Variabel terikat (dependen) Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional dan keberadaan dewan komisaris independen secara positif memengaruhi penghindaran pajak, sementara variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.
7	Fitria (2018)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif Dan <i>Size</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel bebas (independen) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepemilikan Institusional</li> <li>• Komisaris Independen</li> <li>• Karakter Eksekutif</li> <li>• <i>Size</i></li> </ul> Variabel terikat (dependen) <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, <i>size</i> terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Sumber: Review berbagai artikel

## 2.4. Kerangka Konseptual

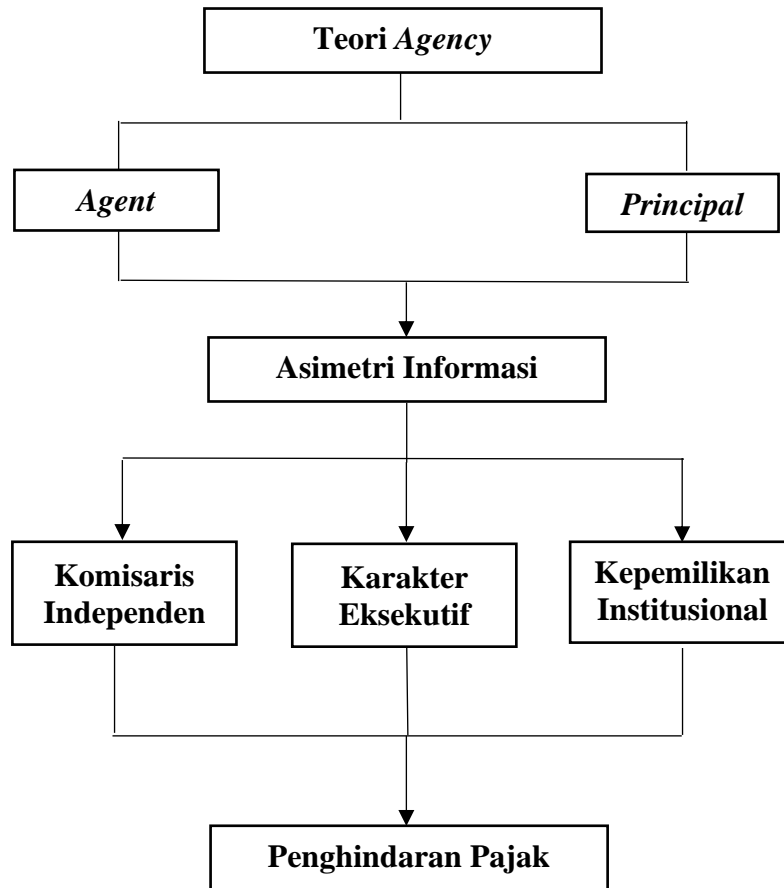
Teori agensi menyatakan bahwa adanya kontrak yang terbentuk antara manajemen perusahaan (*agent*) dan pemilik perusahaan (*principal*). Manajer perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab kepada pemilik perusahaan untuk memberikan hasil yang maksimal, agar bisa mendapatkan bonus dari hasil kinerjanya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

Teori agensi diasumsikan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi oleh kepentingan pribadi. Dalam konteks manajemen, manajer cenderung bersikap *opportunistic* dengan mengutamakan kepentingan pribadinya, seperti menghindari beban pajak tinggi. Sebagai *agent*, manajer berada di posisi yang lebih dekat dengan operasional perusahaan, sehingga memiliki akses lebih banyak terhadap informasi daripada *principal*. Ketika *principal* tidak dapat secara terus-menerus memantau aktivitas perusahaan, *agent* dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk melakukan manipulasi laporan keuangan atau manajemen laba, dengan tujuan mengurangi beban pajak dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Penyimpangan informasi yang terjadi diantara *principal* dan *agent* menimbulkan ketidakseimbangan yang disebut sebagai asimetri informasi, yang pada dasarnya merujuk pada ketidaksetaraan informasi antara pihak yang memberikan arahan (*principal*) dan pelaksana tugas (*agent*). Akibat asimetris informasi membuat perusahaan atau manajer sebagai *agent* akan bertindak oportunistik untuk melakukan penghindaran pajak.

Untuk meminimalkan praktik praktik kecurangan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, kehadiran dewan komisaris independen menjadi suatu

keharusan bagi perusahaan. Peran komisaris independen sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan, dengan tujuan memastikan bahwa praktik perpajakan yang diterapkan sejalan dengan kepentingan jangka panjang dari para pemegang saham. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan melalui pengambilan keputusan yang tidak lepas dari karakter yang dimiliki eksekutif, karena hak yang dimiliki pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan dapat mendorong para eksekutif diperusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Seorang eksekutif yang berani buat pengambilan keputusan yang beresiko ialah eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker*, sedangkan eksekutif yang menghindari resiko disebut eksekutif *risk averse*. Kepemilikan institusional investor besar dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya, serta hubungan pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, maka kerangka konseptual yang digunakan yakni:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **2.5. Pengembangan Hipotesis**

### **2.5.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut konsep agensi, terdapat keterkaitan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Manajer perusahaan, sebagai entitas yang berada di garis depan perusahaan, memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham. Ketidakseimbangan informasi antara kedua pihak ini menghasilkan kondisi asimetris informasi. Oleh karena itu, kehadiran komisaris independen dianggap sebagai langkah yang dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi tersebut, yang mungkin memberikan keuntungan kepada manajemen



dalam merencanakan tindakan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Secara teoritis, komisaris independen dalam dewan pengawas diperlukan untuk memantau dan mengendalikan aktivitas manajemen, terkait perilaku oportunistik (Santoso & Muid, 2014). Pemantauan tersebut dapat membuat manajer lebih berhati-hati dalam pengelolaannya sehingga pengurangan aktivitas jumlah pembayaran pajak yang dilakukan melalui penghindaran pajak dapat diminimalkan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Peningkatan jumlah dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan mampu memberikan peningkatan pemantauan yang optimal terhadap kinerja direksi. Dengan adanya lebih banyak komisaris independen, pemantauan terhadap manajemen perusahaan juga akan diperkuat, yang pada gilirannya dapat mengurangi upaya menghindari pembayaran pajak (Feranika, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2022) mengindikasikan adanya komisaris independen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin banyak komisaris independen yang terdapat di dalam perusahaan, maka kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak juga akan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh pengawasan ketat yang dilakukan oleh komisaris independen, yang mendorong manajemen untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan terkait perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & Rana (2021) dan Dewi & Oktaviani (2021) juga menunjukkan keberadaan komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan menurunkan peluang penghindaran pajak**

### **2.5.2. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam teori agensi, atasan memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan guna pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter, yaitu sebagai seseorang yang berani mengambil risiko (*risk taker*) dan sebagai individu yang lebih cenderung menghindari risiko (*risk averse*). Eksekutif dengan keberanian mengambil risiko menggunakan kapasitasnya untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan bersedia membuat keputusan yang berisiko. Sebaliknya, eksekutif yang cenderung menghindari risiko akan lebih bersikap hati-hati, sehingga kecenderungan untuk kurang agresif dalam strategi penghindaran pajak (Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna, 2020). Oleh karena itu untuk mengetahui setiap karakter eksekutif pada perusahaan dilihat dari besar kecilnya risiko suatu perusahaan (*corporate risk*). Potensi risiko dalam sebuah perusahaan dapat mencerminkan perilaku yang tidak konvensional. Manajer yang cenderung mengambil risiko umumnya memiliki dorongan untuk mencapai arus kas yang signifikan guna mencapai target yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Peningkatan arus kas ini, yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak, dapat menghasilkan efisiensi dalam pemotongan beban pajak. Oleh karena itu, manajemen dengan sifat *risk taker* akan berupaya meningkatkan pendapatan perusahaan secara keseluruhan.

Hasil dari penelitian Lukito & Oktaviani (2022) mengindikasikan karakter eksekutif dapat memberikan pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak cenderung akan meningkat ketika eksekutif memiliki sifat *risk taker*. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ryzki & Fuadi (2019), Singly & Sukartha (2015) yang juga mendukung bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2 : Semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung akan mendorong penghindaran pajak.**

### **2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

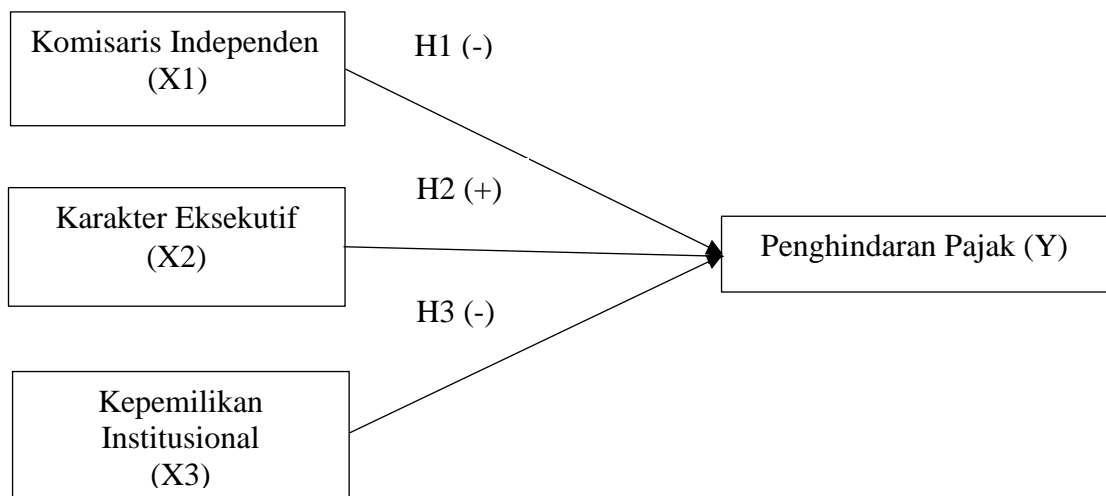
Jensen & Meckling (1976) mendeskripsikan adanya keterkaitan antara pemberi wewenang (prinsipal) dan penerima wewenang (agen). Peran signifikan dari kepemilikan institusional termanifestasi dalam upaya mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.. Besarnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan berpotensi memonitor manajemen secara lebih ketat, menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik dari pihak manajemen. Slovin & Sushka (1993) terdapat hubungan positif antara peningkatan nilai perusahaan dengan efektivitas institusi sebagai alat pemantauan. Dalam proporsi yang semakin tinggi dari kepemilikan saham yang dipegang oleh institusi, tingkat pengawasan eksternal terhadap perusahaan juga akan meningkat secara proporsional. Kepemilikan institusional yang signifikan cenderung mendorong perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Hal ini disebabkan

oleh tanggung jawab perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang jelas kepada pemegang saham. Dengan demikian, pemilik institusional memastikan bahwa keputusan manajemen bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan, menghindari praktik kecurangan termasuk penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, semakin besar kepemilikan institusional, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Hal ini disebabkan pihak institusional yang memiliki banyaknya saham mampu memberikan pengawasan terhadap manajer untuk menghindari adanya perilaku oportunistik. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Afrika (2021), Lastyanto & Setiawan (2022) dengan mempertimbangkan temuan sebelumnya yang menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

**H3 : Semakin besar kepemilikan institusional maka akan menurunkan penghindaran pajak**

Dari tiga hipotesis yang telah diajukan, maka dalam penelitian ini, merumuskan model penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Definisi Operasional**

Penelitian ini mencakup 2 aspek utama, yakni variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*).

##### **3.1.1. Variabel Terikat (*dependent variable*)**

Penelitian ini menjadikan penghindaran pajak sebagai variabel terikat. Penghindaran pajak adalah serangkaian strategi yang diimplementasikan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak secara sah, dengan memanfaatkan berbagai insentif dan ketentuan hukum yang tersedia. Menurut Dyreng et al., (2010) penghindaran pajak diukur melalui *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang mencerminkan jumlah pembayaran pajak tunai terhadap laba sebelum pajak penghasilan. Diharapkan tarif pajak tunai CETR dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Data penghindaran pajak dapat diketahui dari laporan keuangan bagian laporan laba rugi dan arus kas operasi. Adapun rumus untuk menghitung CETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

Adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi indikasi CETR, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, bila indikasi CETR

cenderung lebih rendah, maka tingkat penghindaran pajak perusahaan cenderung lebih tinggi.

### **3.1.2. Variabel Bebas (independent variable)**

Variabel independen (X) adalah variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dalam kerangka penelitian ini, variabel independen terdiri dari komisaris independen (X1), karakter eksekutif (X2), dan kepemilikan institusional (X3).

#### **3.1.2.1. Komisaris Independen**

Komisaris Independen merupakan individu yang bebas dari ikatan dengan manajemen, pemegang saham utama, atau rekan komisaris lainnya, serta tidak terlibat dalam transaksi bisnis atau ikatan lain yang mungkin memengaruhi kemandirian mereka dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan perusahaan. Komisaris independen, yang merupakan anggota dewan komisaris dari luar perusahaan emiten, diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Tujuan keberadaan Dewan Komisaris Independen adalah untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak pengelola. Informasi mengenai dewan komisaris dapat ditemukan dalam bagian informasi umum pada laporan keuangan. Menurut Puspita & Harto (2014) indeks komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah dewan komisaris independen di perusahaan dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris.

$$INDEP = \frac{JUMLAH\ DEWAN\ KOMISARIS\ INDEPENDEN}{JUMLAH\ SELURUH\ DEWAN\ KOMISARIS}$$

Keterangan:

INDEP : Independen

Semakin banyak jumlah komisaris independen pada suatu perusahaan maka pengawasan terhadap para manajer juga akan semakin tinggi sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, apabila komposisi komisaris independen di suatu perusahaan sedikit, pengawasan terhadap aktivitas manajerial cenderung menurun, sehingga potensi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak juga meningkat.

#### **3.1.2.2. Karakter Eksekutif**

Karakter eksekutif mencerminkan karakter yang melekat pada setiap individu yang memimpin sebuah perusahaan, yang dapat berupa kecenderungan mengambil risiko (*risk taker*) atau lebih bersifat menghindari risiko (*risk averse*). Eksekutif dikatakan memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* dilihat berdasarkan setiap keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan. Jika keputusan yang diambil berisiko, maka menunjukkan pemimpin berkarakteristik *risk taker*. Umumnya eksekutif bersifat *risk taker* didorong oleh dorongan yang mendalam untuk meraih peningkatan pendapatan, status, kesejahteraan pribadi, dan tingkat otoritas. Sementara itu, apabila seorang pemimpin memiliki keberanian yang terbatas dalam mengambil keputusan di lingkungan bisnis, hal ini mencerminkan sifat *risk averse*. Menurut Butje & Tjondro (2014), seseorang yang memiliki kecenderungan untuk menghindari risiko cenderung menjauhi setiap jenis peluang yang mungkin menimbulkan risiko, dan lebih mengalokasikan sebagian besar dari



aset mereka ke dalam investasi yang dianggap relatif aman, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian finansial

Penelitian ini menilai karakter eksekutif dengan menggunakan metode pengukuran risiko perusahaan yang melibatkan perhitungan rasio EBIT (*Earning Before Income Tax*) terhadap total aktiva perusahaan (Paligorova, 2010). Tingkat risiko suatu perusahaan akan mencerminkan sifat individu pimpinan perusahaan sebagai *risk taker* atau *risk averse*. Data EBIT didapatkan melalui laporan tahunan perusahaan bagian laporan laba rugi. Sedangkan total aset dalam perhitungan karakter eksekutif diketahui melalui laporan posisi keuangan. Rumus yang digunakan untuk menghitung risiko perusahaan adalah sebagai berikut:

$$RISK = \frac{EBIT}{TOTAL ASET}$$

Keterangan:

RISK : Risiko

EBIT : *Earning Before Income Tax*

Eksekutif yang menunjukkan keterlibatan di tingkat *corporate risk* di atas rata-rata akan diberi penilaian 1, mencerminkan sifatnya sebagai pengambil risiko yang berani mengambil keputusan dengan tingkat risiko yang tinggi. Sebaliknya, bagi eksekutif yang menunjukkan keterlibatan di tingkat *corporate risk* di bawah nilai rata-rata, akan diberi penilaian 0, mencerminkan sifatnya sebagai individu yang cenderung menghindari risiko dan memilih untuk tidak mengambil keputusan yang melibatkan risiko tinggi. (Ekaputra Tj *et al.*, 2020).

### 3.1.2.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan sejumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan atau institusi, termasuk dana pensiun, perusahaan asuransi, yayasan, bank, perusahaan investasi, dan perusahaan berbentuk perseroan (PT) dan entitas institusi lainnya. Tingkat kepemilikan ini dapat diukur melalui persentase saham yang dimiliki oleh entitas-ini pada akhir periode tertentu, diungkapkan sebagai rasio persentase yang menggambarkan proporsi saham yang dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut. Menurut Faisal (2005), peran pengawasan oleh pemegang saham institusional menjadi semakin krusial dengan meningkatnya kepemilikan institusi, khususnya ketika kepemilikan tersebut mencapai lebih dari 5% memiliki kapabilitas yang cukup besar dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas manajemen perusahaan. Menurut Tarjo (2008) variabel kepemilikan institusional menggunakan perhitungan dengan membagi jumlah saham institusi di perusahaan dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar. Saham institusional dapat diketahui dari catatan atas laporan keuangan bagian modal saham. Adapun pengukurannya sebagai berikut:

$$KEI = \frac{JUMLAH SAHAM INSTITUSIONAL}{JUMLAH SAHAM BEREDAR}$$

Keterangan:

KEI : Kepemilikan Institusional

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala pengukuran
Penghindaran pajak	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
Komisaris Independen	$INDEP = \frac{\text{JUMLAH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN}}{\text{JUMLAH SELURUH DEWAN KOMISARIS}}$	Rasio
Karakter Eksekutif	$RISK = \frac{EBIT}{TOTAL ASET}$	Rasio
Kepemilikan Institusional	$KEI = \frac{\text{JUMLAH SAHAM INSTITUSIONAL}}{\text{JUMLAH SAHAM BEREDAR}}$	Rasio

Sumber: data diolah, 2023

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup entitas perusahaan manufaktur yang berfokus pada sektor barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Pemilihan perusahaan ini didasarkan pada signifikansi pangsa pasar dan peran penting sebagai penyedia kebutuhan masyarakat. Keputusan ini didorong oleh realitas bahwa perusahaan-perusahaan dalam sektor barang konsumsi cenderung mengalami peningkatan permintaan produksi, yang secara langsung mempengaruhi pendapatan bersih dan implikasinya terhadap beban pajak perusahaan. Selain itu, dalam konteks sektor ini, terdapat kasus-kasus tertentu di mana perusahaan terlibat dalam strategi penghindaran pajak, menjadi aspek penting untuk diteliti.

Pemilihan sampel untuk penelitian ini dilakukan melalui metode *purposive sampling*, yang mengacu pada proses pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

1. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2018-2022.
2. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama berturut-turut pada rentang waktu 2018-2022.
3. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak mengalami kerugian pada rentang waktu 2018-2022.

**Tabel 3.2 Tabel Kriteria Sampel Penelitian**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2018-2022.	<b>85</b>
Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama berturut-turut pada rentang waktu 2018-2022.	<b>(37)</b>
Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami kerugian selama rentang waktu 2018-2022.	<b>(20)</b>
<b>Jumlah sampel</b>	<b>28</b>
<b>Jumlah data tahun amatan 2018-2022</b>	<b>140</b>

*Sumber: data diolah, 2023*

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dalam bentuk angka dan numerik. Data-data untuk penelitian ini diperoleh melalui analisis laporan tahunan serta laporan keuangan perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah melalui proses audit. Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses langsung situs perusahaan pada rentang waktu 2018-2022.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode dokumentasi menjadi landasan utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini. Metode dokumentasi dilakukan dengan menggali sumber

informasi seperti buku, arsip, dokumen, foto, serta laporan keuangan guna mendukung penelitian. Fokus penelitian ini terletak pada analisis laporan keuangan perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang terpublikasikan di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2018-2022. Sumber data dapat diakses melalui situs web resmi perusahaan atau Bursa Efek Indonesia.

### **3.5. Alat Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda diimplementasikan menggunakan perangkat lunak SPSS sebagai alat bantu. Model regresi linier berganda digunakan untuk mengeksplorasi hubungan dinamis antara satu variabel dependen dan beberapa variabel independen yang terlibat.

#### **3.5.1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan ilmu statistik yang mengorganisir dan menguraikan data melalui metode pengelompokan, penentuan nilai, dan penyajian statistik dalam bentuk tabel yang beragam (Gani & Amalia, 2018). Fokus utama dari statistik deskriptif adalah menyajikan data dengan cara yang memudahkan pembacaan dan pemahaman, yang tercermin dalam informasi seperti jumlah sampel, nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum.

#### **3.5.2. Uji Kelayakan Model**

##### **3.5.2.1. Uji F**

Pada penelitian ini uji statistik F yang digunakan disebut uji kelayakan model untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak layak digunakan. Secara prinsip, model yang dianggap layak adalah

model yang mampu menggambarkan dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun standar yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05, menandakan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini sesuai atau layak.
- b. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak memenuhi kriteria untuk digunakan dalam penelitian ini.

### **3.5.3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan sebelum melakukan uji hipotesis. Tujuan dari adanya asumsi klasik terletak pada upaya untuk menjamin kelancaran analisis regresi dan memastikan bahwa model yang dibangun memenuhi persyaratan statistik. Asumsi klasik membantu memitigasi risiko munculnya masalah statistik selama proses pembentukan model regresi, sehingga memastikan kevalidan dan keberlakuan interpretasi hasil statistik. Penelitian ini melibatkan empat pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, yang secara kolektif memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas model regresi yang telah disusun.

#### **3.5.3.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah distribusi variabel bebas dan variabel terikat dalam model regresi dapat dianggap distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Dalam konteks penelitian ini, Kolmogorov-Smirnov dipilih sebagai metode untuk menguji normalitas, di mana dasar untuk membuat keputusan tentang uji normalitas ini yaitu:

- a. Jika nilai signifikansi melebihi 0,05 (dinyatakan dengan  $\text{Sig} > 0,05$ ), dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki distribusi yang mengikuti pola normal.
- b. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (dinyatakan dengan  $\text{Sig} < 0,05$ ), dapat disimpulkan bahwa data tidak mengikuti pola distribusi normal.

### 3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengidentifikasi keberadaan keterkaitan antar variabel independen dalam suatu model analisis (Sujarweni & Utami, 2019). Dalam penelitian ini pengujian multikolinearitas digunakan untuk melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF), di mana dasar untuk membuat keputusan tentang uji multikolinearitas ini yaitu:

- a. Jika nilai VIF melebihi angka 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0.1, itu menunjukkan indikasi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai *tolerance* melebihi dari 0.1, tidak ada indikasi multikolinearitas.

### 3.5.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan dengan maksud untuk menilai apakah ada keterkaitan korelasi antara gangguan pada model regresi pada suatu periode tertentu (t) dan gangguan pada periode sebelumnya (t-1). Dalam konteks penelitian ini, metode pengujian autokorelasi yang diterapkan adalah uji Durbin-Watson. Keputusan terkait keberadaan atau tidak adanya korelasi diambil berdasarkan analisis hasil pengujian sebagai berikut:

- a. Jika nilai  $d$  (Durbin Watson) lebih rendah dari nilai  $dL$  atau lebih tinggi dari pada  $(4-dL)$  maka terjadi autokorelasi.
- b. Jika nilai  $d$  (Durbin Watson) berada di antara nilai  $dU$  dan nilai  $(4-dU)$  maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

#### **3.5.3.4. Uji Heterokedastisitas**

Menurut Ghozali (2018), tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk menilai apakah terdapat ketidakseragaman variasi dalam residual dari satu observasi ke observasi lain dalam suatu model regresi. Prasyarat penting dalam model regresi adalah ketiadaan gejala heteroskedastisitas. Untuk mengidentifikasi keberadaan ada tidaknya heteroskedastisitas, sebagai berikut:

- a. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, itu menandakan adanya heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada struktur atau pola yang terlihat jelas, titik-titik tersebar secara acak di sekitar angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.

#### **3.5.3.5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ialah suatu analisis yang dipakai untuk mengukur seberapa jauh model dapat menjelaskan persentase variasi variabel dependen melalui variabel independen. Rentang nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1, di mana nilai yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan bantuan variabel independen. Sebaliknya, nilai  $R^2$  yang rendah



menunjukkan keterbatasan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

#### **3.5.4. Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai variabel, termasuk satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Dalam konteks penelitian ini, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk menguji hipotesis, untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran umum tentang pengaruh komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. Persamaan yang menjadi instrumen pengujian hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Penghindaran pajak

X1 : Komisaris Independen

X2 : Karakter Eksekutif

X3 : Kepemilikan Institusional

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$ - $\beta_3$  : Koefisien regresi variabel independen

$\varepsilon$  : term of error (tingkat kelonggaran kesalahan)

#### **3.5.5. Uji Hipotesis (Uji t)**

Analisis statistik menggunakan uji t bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Analisis statistik dengan uji t digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t menghasilkan nilai positif dan negatif, di mana nilai positif mengindikasikan hubungan sejalan antara variabel independen dan variabel dependen, sementara nilai negatif menandakan hubungan terbalik antara keduanya. Kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ialah :

- a. Jika nilai signifikansi uji-t  $< 0,05$ , dan koefisien berarah positif maka hipotesis didukung.
- b. Jika nilai signifikansi uji-t  $> 0,05$ , dan koefisien berarah negatif maka hipotesis tidak didukung.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini, tertuju pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi yang telah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang waktu 2018-2022. Data yang dipergunakan berasal dari dokumen laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana kriteria dan pertimbangan tertentu menjadi dasar untuk seleksi sampel.

**Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian**

Kriteria	Jumlah
Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2018-2022.	<b>85</b>
Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama berturut-turut pada rentang waktu 2018-2022.	<b>(37)</b>
Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang mengalami kerugian selama rentang waktu 2018-2022.	<b>(20)</b>
<b>Jumlah sampel</b>	<b>28</b>
<b>Jumlah data tahun amatan 2018-2022</b>	<b>140</b>
<b>Data outlier</b>	<b>14</b>
<b>Jumlah data yang diolah</b>	<b>126</b>

*Sumber: data diolah, 2023*

Jumlah data amatan yang diperoleh selama 5 tahun sebanyak 140 data. Ada 14 data outlier yang harus dikeluarkan dari sampel, sehingga jumlah data yang tersisa untuk diolah dalam penelitian ini sebanyak 126 data. Data outlier adalah data yang muncul dalam bentuk nilai ekstrim dan memiliki karakteristik yang tidak konsisten dengan sebagian besar data lainnya. Data outlier diketahui ketika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji outlier dengan melihat grafik

boxplot, angka yang berada di luar boxplot harus dikeluarkan agar bebas dari outlier.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan data terkait karakteristik sampel, mencakup nilai minimal, maksimal, rata-rata, dan deviasi standar dari setiap variabel penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian ini, fokus analisis statistik deskriptif difokuskan pada variabel-variabel seperti penghindaran pajak, komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional di perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2018-2022.

**Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistic					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	126	0,166	1.000	0,40747	0,105561
Karakter Eksekutif	126	0,022	0,299	0,13878	0,058059
Kepemilikan Institusional	126	0,425	1.000	0,79120	0,132503
Penghindaran Pajak	126	0,048	0,489	0,24266	0,092490
Valid N (listwise)	126				

Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, hasil analisis statistik deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel independen Komisaris Independen (X1) menunjukkan nilai minimum 0,166 di perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2020-2022, dan maksimum 1.000 di perusahaan Wahana Interfood Nusantara Tbk

pada tahun 2018. Rata-rata (*mean*) mencapai 0,40747 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,10556.

2. Variabel independen Karakter Eksekutif (X2) mencatat nilai minimum 0,022 di perusahaan Wismilak Inti Makmur Tbk tahun 2019, sedangkan maksimum 0,299 terdapat di perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2020. Rata-rata (*mean*) mencapai 0,13878 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,058059.
3. Variabel independen Kepemilikan Institusional (X3) menunjukkan nilai minimum 0,425 dan maksimum 1.000, terlihat pada perusahaan Wahana Interfood Nusantara Tbk pada tahun 2018 & 2021. Rata-rata (*mean*) mencapai 0,79120 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,132503.
4. Variabel dependen Penghindaran Pajak (Y) memiliki nilai minimum 0,048 di perusahaan Phapros Tbk tahun 2020, dan maksimum 0,489 di perusahaan Tempo Scan Pacific Tbk pada tahun 2020. Rata-rata (*mean*) mencapai 0,24266 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,092490.

#### **4.2.2. Uji Kelayakan Model**

##### **4.2.2.1. Uji F**

Uji F digunakan untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak layak digunakan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji kelayakan :

**Tabel 4.3 Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0,092	3	0,031	3,807	0,012 <sup>b</sup>
Residual	0,978	122	0,008		
Total	1,069	125			

Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4.3, tergambar dengan jelas bahwa angka signifikansi memiliki nilai sebesar 0,012, yang mana lebih kecil daripada batas 0,05. Oleh karena itu, dapat diungkapkan bahwa model regresi ini layak digunakan.

### 4.2.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah distribusi data dari variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi menunjukkan pola distribusi normal atau tidak. Metode penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov sebagai alat untuk mengukur tingkat normalitasnya. Jika nilai signifikansi melebihi 0,05, dapat disarankan bahwa data mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Berdasarkan hasil olah data menggunakan SPSS 26, diperoleh hasil uji normalitas *kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i> (Sebelum Outlier)	<i>Unstandardized Residual</i> (Setelah Outlier)
N		140	126
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	1,33152810	0,08844350
Most Extreme Differences	Absolute	0,328	0,066
	Positive	0,328	0,062
	Negative	-0,297	-0,066
Test Statistic		0,328	0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,000 <sup>c</sup>	0,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4.4, dapat disimpulkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* dari uji normalitas adalah 0,000, yang jauh lebih rendah daripada nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tidak terdistribusi secara normal sehingga dilakukan outlier agar data yang akan diteliti berdistribusi normal. Setelah dilakukan outlier terdapat 14 data ekstrim yang dihilangkan, sehingga data yang tersisa untuk digunakan sebanyak 126 sampel. Hasil analisis data setelah penanganan outlier menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200, melebihi nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data telah mengikuti distribusi normal.

#### 4.2.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kesamaan antara variabel independen dalam suatu model (Sujarweni & Utami, 2019). Metode ini memanfaatkan analisis “nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)*”. Jika nilai VIF melampaui 10 dan nilai *tolerance* di bawah 0,1, maka dapat disimpulkan terdapat indikasi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF di bawah

10 dan nilai tolerance di atas 0,1, dapat dianggap bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas dalam model tersebut.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Komisaris Independen	0,999	1,001
Karakter Eksekutif	0,898	1,114
Kepemilikan Institusional	0,897	1,115

Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.5, uji multikolinearitas menyatakan bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance melebihi 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang akan diteliti dapat digunakan karena tidak ada kecenderungan multikolinieritas.

#### 4.2.3.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah ada korelasi antara gangguan pada periode ke-t dengan gangguan pada periode sebelumnya (ke-t-1) dalam suatu model regresi. Dalam rangkaian penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin Watson. Ketika nilai d (Durbin Watson) berada di bawah batas rendah (dL) atau melebihi batas tinggi (4-dL), dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai d berada di antara batas tinggi (dU) dan batas rendah (4-dU), maka dapat dianggap bahwa tidak ada autokorelasi.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,293 <sup>a</sup>	0,086	0,063	0,08952	1,861

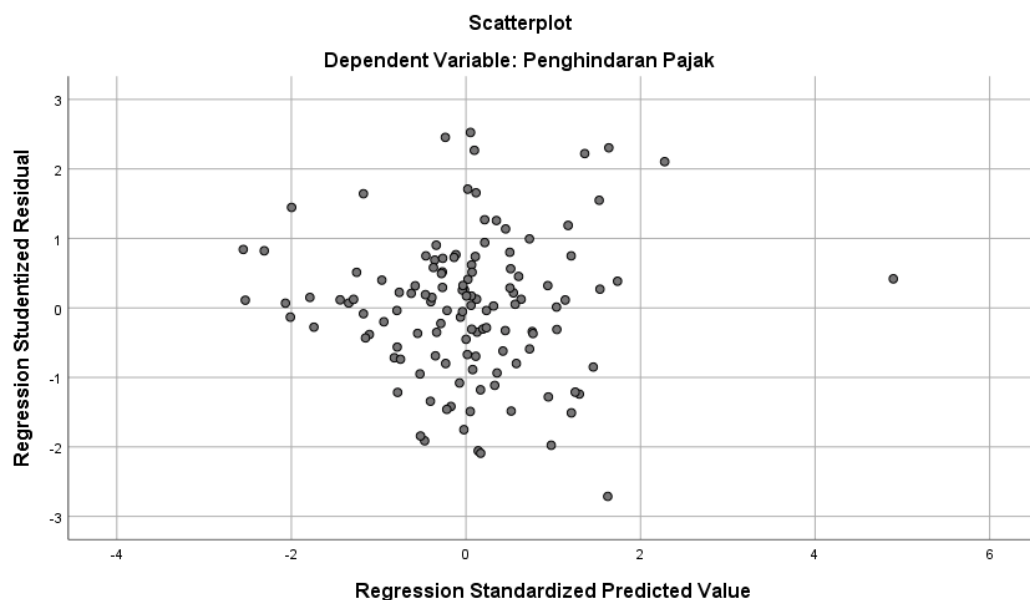
Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023



Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,861. Nilai tersebut dapat dibandingkan dengan nilai  $d_U$  yang dapat dicari pada tabel *Durbin Watson*. Berdasarkan variabel independen  $k = 3$  dan jumlah data acuan  $n = 126$  dengan signifikansi 5% maka ditemukan nilai  $d_U$  sebesar 1,758 dan  $d_L$  sebesar 1,660. Jika dilihat dari hasil tersebut nilai *durbin watson* terletak antara nilai  $d_U$ , yaitu  $1,758 < 1,861 < 2,241$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

#### 4.2.3.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan maksud menguji apakah ada perbedaan varians yang signifikan antara residual dari satu observasi ke observasi lain dalam suatu model regresi. Dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik *scatterplot*.



**Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas**

*Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023*

Gambar 4.1 menunjukkan penyebaran acak titik data di atas dan di bawah nol pada sumbu Y. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa tidak terdapat pola yang dapat diidentifikasi dalam distribusi titik-titik tersebut. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.2.3.5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah analisis untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan persentase variabel terikat (penghindaran pajak) terhadap variabel bebas (komisaris independen, karakter eksekutif, kepemilikan institusional).

**Tabel 4.7 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,293 <sup>a</sup>	0,086	0,063	0,08952

Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai R square ( $R^2$ ) sebesar 0,086 atau sama dengan 8,6%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel terikat yaitu penghindaran pajak dapat menjelaskan sebesar 8,6% oleh variabel bebas yang digunakan yaitu komisaris independen, karakter eksekutif, dan kepemilikan institusional. Adapun 91,4% sisa penjelasan berasal dari beragam variabel dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.2.4. Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks antara berbagai variabel, termasuk satu variabel dependen dan beberapa

variabel independen. Berikut adalah hasil penelitian dari pengujian analisis linier berganda :

**Tabel 4.8 Hasil Analisis Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(constant)	0,191	0,057		3,349	0,001
Komisaris Independen	0,194	0,076	0,221	2,552	0,012
Karakter Eksekutif	-0,313	0,146	-0,197	-2,154	0,033
Kepemilikan Institusional	0,021	0,064	0,030	0,331	0,741

Sumber: Data diolah SPSS versi 26, 2023

Dengan merujuk pada tabel 4.8, terungkaplah persamaan linier berganda yang menyajikan hasil tersebut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,191 + 0,194X_1 - 0,313X_2 - 0,021X_3 + \varepsilon$$

Berikut ini ialah penjelasan mengenai model regresi dengan persamaan linier berganda yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 0,191 yang berarti jika variabel independen yaitu, komisaris independen, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional dimasukan dalam persamaan regresi maka nilai konstanta menunjukkan nilai CETR sebesar 0,191. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tanpa adanya variabel komisaris independen, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan berkurang sebesar 0,191. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak.
2. Nilai koefisien regresi ( $X_1$ ) yaitu variabel komisaris independen menunjukkan bahwa setiap kenaikan komisaris independen sebesar 1 maka CETR akan bertambah sebesar 0,194. Dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 pada variabel komisaris independen maka penghindaran pajak akan mengalami

penurunan sebesar 0,194. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen cenderung menurunkan peluang penghindaran pajak.

3. Nilai koefisien regresi (X2) yaitu variabel karakter eksekutif menunjukkan bahwa setiap kenaikan karakter eksekutif sebesar 1 maka CETR akan berkurang sebesar 0,313. Dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 pada variabel karakter eksekutif maka penghindaran pajak akan meningkat sebesar 0,313. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung mendorong penghindaran pajak
4. Nilai koefisien regresi (X3) yaitu variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1 maka CETR akan bertambah sebesar 0,021. Dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan 1 pada variabel kepemilikan institusional maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,021. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecil kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **4.2.5. Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t adalah metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam proses pengujian ini, perbandingan signifikansi t dilakukan antar variabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.9 diatas, maka penjelasan mengenai hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel komisaris independen (X1) memiliki nilai koefisien regresi 0,191 dengan signifikansi sebesar 0,012 (nilai sig < 0,05). Semakin tinggi nilai komisaris independen maka semakin tinggi nilai CETR perusahaan yang berarti tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen cenderung menurunkan peluang penghindaran pajak sehingga H1 didukung.
2. Variabel karakter eksekutif (X2) memiliki nilai koefisien regresi -0.313 dengan signifikansi sebesar 0,033 (nilai sig < 0,05). Semakin tinggi nilai karakter eksekutif maka semakin rendah nilai CETR perusahaan yang berarti tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung mendorong penghindaran pajak sehingga H2 didukung.
3. Variabel kepemilikan institusional (X3) memiliki nilai koefisien regresi 0.021 dengan signifikansi sebesar 0,741 (nilai sig > 0,05). Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai CETR perusahaan yang berarti tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Namun karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga faktor-faktor tersebut

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H3 tidak didukung.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Koefisien regresi variabel komisaris independen (X1) ialah 0,191, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Artinya, semakin meningkat nilai komisaris independen, maka akan semakin meningkat pula nilai CETR perusahaan, menandakan penurunan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung, semakin banyak jumlah komisaris independen cenderung menurunkan peluang penghindaran pajak.

Dalam teori agensi menjelaskan adanya hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Salah satu masalah utama dalam teori agensi adalah asimetri informasi, yaitu situasi dimana manajer lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan dari pada pemilik perusahaan. Manajer perusahaan yang memiliki pengetahuan lebih terhadap peraturan dan praktik perpajakan dapat memanfaatkan asimetri informasi ini untuk menerapkan praktik penghindaran pajak yang tidak selalu demi kepentingan pemegang saham.

Komisaris independen memiliki peran penting dalam memantau aktivitas manajemen terkait perilaku oportunistik yang dilakukan. Oleh karena itu komisaris

independen harus memiliki pemahaman mendalam tentang masalah perpajakan dan praktik perpajakan perusahaan. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat bertindak sebagai perantara yang efektif antara manajemen perusahaan dan pemegang saham dalam hal penghindaran pajak. Selain itu untuk menjaga kepentingan pemegang saham dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, komisaris independen harus bertindak dengan independensi dan jujur.

Selain itu komisaris independen dari beberapa perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi ternyata berasal dari kalangan akademisi seperti pada perusahaan PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT Kalbe Farma, PT Sekar Bumi Tbk. Komisaris independen, khususnya yang memiliki latar belakang akademisi, sering membawa perspektif etika tinggi dan nilai integritas ke dewan komisaris. Pada umumnya, para akademisi menunjukkan kecenderungan memiliki standar etika yang tinggi, sehingga cenderung mengurangi keinginan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang kontroversial atau tidak etis.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Hidayat *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada penghindaran pajak berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan justru akan bertanggung jawab dalam memantau manajemen guna memastikan agar perusahaan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

### 4.3.2. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Variabel karakter eksekutif (X2) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,313 dengan tingkat signifikansi 0,033 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Semakin tinggi nilai karakter eksekutif, semakin rendah nilai CETR perusahaan, mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua didukung, semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung mendorong penghindaran pajak.

Teori agensi menjelaskan bahwa terdapat kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham memberikan otorisasi kepada manajer untuk menjalankan tugasnya sebagai manajemen yang mengatur dan mengambil setiap keputusan. Pengambilan keputusan tentunya tidak lepas dari karakter yang dimiliki eksekutif, karena hak yang dimiliki pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan dapat mendorong para eksekutif diperusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan berisiko, termasuk menghindari pajak, adalah sosok yang memiliki jiwa pemberani dalam menghadapi risiko.

**Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Karakter Eksekutif (nominal)**

<b>Keterangan</b>	<b><i>Risk Taker</i></b>	<b><i>Risk Averse</i></b>	<b>Total</b>
Jumlah Observasi	68	58	126
Persentase	54%	46%	100%

*Sumber: Data diolah, 2023*



Berdasarkan tabel 4.9, perbandingan karakter eksekutif yang menjelaskan bahwa terdapat 68 observasi (54%) yang menunjukkan sifat *risk taker* sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* sebanyak 58 (46%). Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan barang konsumsi yang menjadi objek penelitian memiliki eksekutif dengan karakter *risk taker* yang berani untuk mengambil keputusan dengan resiko yang besar termasuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk mendapatkan laba sebesar besarnya. Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa sikap karakter eksekutif yang berani mengambil resiko (*risk taker*) untuk memanfaatkan celah hukum dalam menghindari pajak lebih berperan signifikan dibandingkan peran kepemilikan institusional walaupun dalam jumlah besar. Persentase kepemilikan institusional pada penelitian ini lebih besar dari 50%.

Hasil dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lukito & Oktaviani (2022) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif yang cenderung bersedia mengambil risiko memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan karakteristik sebagai pengambil risiko, para eksekutif cenderung menggunakan keterampilan kepemimpinan mereka untuk secara berani mengambil keputusan yang berisiko, dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan.

#### **4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Koefisien regresi pada variabel kepemilikan institusional (X3) sebesar 0,021, dengan tingkat signifikansi mencapai 0,741 (nilai sig > 0,05). Semakin tinggi nilai kepemilikan institusional maka semakin tinggi nilai CETR perusahaan yang

berarti tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin menurun. Namun karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga faktor-faktor tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Sebab, sifat CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga H3 tidak didukung.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan dengan memberikan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajemen. Dengan kata lain, besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memengaruhi intensitas penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Implikasinya, pemegang saham institusional mungkin tidak efektif sebagai pengendali yang mampu mengontrol perusahaan dengan baik terkait tindakan manajemen terkait penghindaran pajak. Meskipun seharusnya diharapkan bahwa kepemilikan institusional dapat berperan dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan memotivasi manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi jangka panjang. Namun disisi lain kepemilikan institusional mendapatkan keuntungan ketika perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak, yang berpotensi meningkatkan profit dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham.

Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2018), yang menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi

oleh kepemilikan suatu institusi. Kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak karena struktur perusahaan dalam sektor manufaktur barang konsumsi mungkin tidak sepenuhnya bergantung pada kepemilikan institusional, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kompetisi pasar dan tuntutan konsumen. Keterlibatan kepemilikan institusional melibatkan pengawasan dan pengendalian manajemen, tetapi institusi lebih condong untuk mengandalkan peran komisaris independen dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian perusahaan. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab komisaris yang juga mewakili kepentingan pemilik institusional (Hidayat *et al.*, 2022).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Semakin besar jumlah komisaris independen maka cenderung akan menurunkan peluang penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2018-2022.
2. Semakin karakter eksekutif bersifat *risk taker* cenderung akan mendorong penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2018-2022.
3. Besar kecilnya kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2018-2022.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi investor yang berniat untuk menanamkan modal pada suatu perusahaan sebaiknya melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangannya. Hal ini bertujuan agar investor dapat memahami dengan baik praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Informasi tersebut sangat bermanfaat sebagai landasan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan investasi, memungkinkan investor untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari praktik penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan yang dipilih.

2. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak dengan memperhatikan komisaris independen, karakter eksekutif dan kepemilikan institusional dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, agar tidak melakukan penghindaran pajak sehingga perusahaan menjalankan kewajibannya dengan baik dan benar.
3. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan variabel independen dari penelitian sebelumnya, mengingat masih adanya banyak faktor yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Selain itu, pengembangan penelitian dapat melibatkan sektor lain selain dari perusahaan barang konsumsi untuk meraih pemahaman yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.3968>
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 4, Issue 2).
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 85(4), 1163–1189. <https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163>
- Faisal. (2005). Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VII. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 8(2), 197–207.
- Feranika, A. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 2(2), 12–21.
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif dan size terhadap tax avoidance. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451.
- Gani, I., & Amalia, S. (2018). *Alat Analisis Data: aplikasi statistik untuk penelitian bidang ekonomi & sosial* (Revisi).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governance, K. N. K. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Hidayat, T., Ayunita Ajengtiyas, A. A., & Ginting, R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akunida*, 8(1), 49–64. <https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.4738>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>

- Kartana, I. W., & Wulandari, N. G. A. S. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.22225/kr.10.1.708.1-13>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Diakses Pada 4 Februari 2023. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Löw, M. (2006). The Social Construction of Space and Gender. *European Journal of Women's Studies*, 13(2), 119–133. <https://doi.org/10.1177/1350506806062751>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Mahadi, T. (2019). *Dilaporkan melakukan penghindaran pajak, Bentoel angkat bicara*. Kontan.Co.Id. Diakses Pada 5 Februari 2023. <https://nasional.kontan.co.id/news/dilaporkan-melakukan-penghindaran-pajak-bentoel-angkat-bicara>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 2021.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Paligorova, T. (2010). *Corporate Risk Taking and Ownership Structure Corporate Risk Taking and Ownership*.
- Parjiono, Hastiadi, F. F., Wardhana, I. W., & Sujai, M. (2018). *Kebijakan multilateral dan pembangunan ekonomi indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /Pojk.04/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek*. (2017). Otoritas Jasa

Keuangan Republik Indonesia. Diakses pada 12 Februari 2023.

- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.
- Pratiwi, F. L., Susilawati, R. A. E., & Purwanto, N. (2016). Analisis Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar DI BEI. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1212>
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh transfer pricing dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 39–50. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p039>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 3, 1–13.
- Rd. Mohd. Raditya Ekaputra dan Asmaul Husna. (2020). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). In *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2206>
- Rizki, M. Q. A., & Fuadi, R. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 547–557. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12592>
- Santoso, T. B., & Muid, D. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–11.
- Simarmata, A. P. P., & Cahyonowati, N. (2014). Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3, 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Slovin, M. B., & Sushka, M. E. (1993). Ownership Concentration, Corporate Control Activity, and Firm Value: Evidence from the Death of Inside Blockholders. *The Journal of Finance*, 48(4), 1293–1321. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04755.x>
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2019). *The Master Book Of SPSS*. Startup.



- Sukmana, Y. (2020). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Kompensasi Eksekutif Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property, Real Estate, Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bei. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 109–133. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4408>
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. (2003). Presiden Republik Indonesia. Diakses pada 4 Februari 2023.
- Wahyudi, U., & Pawestri, H. P. (2006). Implikasi struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan: dengan keputusan keuangan sebagai variabel intervening. *Simposium Nasional Akuntansi*, 9(1), 1–25.
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Zemzem, A., Khaoula, F., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Directors' Characteristics on Tax Aggressiveness. In *Research Journal of Finance and Accounting* [www.iiste.org](http://www.iiste.org) ISSN (Vol. 4, Issue 4). Online. <https://www.researchgate.net/publication/311766760>

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022.

No	Nama Perusahaan	Kode
1	PT Akasha Wira International Tbk	ADES
2	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI
3	PT Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP
4	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
5	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEO
6	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk	COCO
7	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
8	PT Darya Varia Laboratoria Tbk	DVLA
9	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
10	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	HMSP
11	PT Buyung Poetra Sembada Tbk	HOKI
12	PT Hartadinata Abadi Tbk	HRTA
13	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
14	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
15	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF
16	PT Merck Indonesia Tbk	MERK
17	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
18	PT Mayora Indah Tbk	MYOR
19	PT Phapros Tbk	PEHA
20	PT Organon Pharma Indonesia	SCPI
21	PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO
22	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM
23	PT Sekar Laut Tbk	SKLT
24	PT Tempo Scan Pacific Tbk	TSPC
25	PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk	ULTJ
26	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR
27	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM
28	PT Integra Indocabinet Tbk	WOOD

## Lampiran 2. Data Penghindaran Pajak

<b>Kode</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pembayaran Pajak</b>	<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>CETR</b>
ADES	2018	6.113.000.000	70.060.000.000	0,08
	2019	15.885.000.000	110.179.000.000	0,14
	2020	19.093.000.000	167.919.000.000	0,11
	2021	57.864.000.000	337.828.000.000	0,17
	2022	82.053.000.000	464.308.000.000	0,17
BUDI	2018	25.799.000.000	71.781.000.000	0,35
	2019	15.448.000.000	83.905.000.000	0,18
	2020	4.556.000.000	69.312.000.000	0,06
	2021	12.875.000.000	113.965.000.000	0,11
	2022	21.397.000.000	116.031.000.000	0,18
CAMP	2018	21.600.130.110	84.038.783.563	0,25
	2019	21.429.110.362	99.535.473.132	0,21
	2020	16.969.073.278	56.816.360.398	0,29
	2021	18.284.484.130	126.156.941.830	0,14
	2022	32.305.956.086	153.914.313.784	0,21
CEKA	2018	13.897.283.933	123.394.812.359	0,11
	2019	51.024.771.845	285.132.249.695	0,17
	2020	68.470.778.126	232.864.791.126	0,29
	2021	67.126.869.331	236.334.817.214	0,28
	2022	68.483.399.069	283.149.105.983	0,24
CLEO	2018	9.128.676.342	81.356.830.315	0,11
	2019	27.000.838.885	172.342.839.552	0,15
	2020	28.882.717.979	168.613.556.985	0,17
	2021	39.838.906.262	229.981.620.687	0,17
	2022	49.638.000.602	248.863.660.595	0,19
COCO	2018	1.706.494.246	4.195.216.992	0,40
	2019	2.620.999.274	10.763.692.936	0,24
	2020	1.758.183.009	3.715.043.422	0,47
	2021	1.564.059.916	10.749.861.691	0,14
	2022	3.683.363.282	10.376.623.131	0,35
DLTA	2018	94.339.700.000	441.248.118.000	0,21
	2019	87.631.571.000	412.437.215.000	0,21
	2020	59.940.288.000	164.704.480.000	0,36
	2021	52.487.053.000	240.865.871.000	0,21
	2022	70.501.581.000	294.211.660.000	0,24
DVLA	2018	76.348.303.000	272.843.904.000	0,28
	2019	79.897.505.000	301.250.035.000	0,26
	2020	57.943.498.000	214.069.167.000	0,27
	2021	83.451.430.000	211.793.627.000	0,39

	2022	61.603.009.000	201.073.217.000	0,30
GGRM	2018	2.897.496.000.000	10.479.242.000.000	0,27
	2019	3.204.640.000.000	14.487.736.000.000	0,22
	2020	2.251.510.000.000	9.663.133.000.000	0,23
	2021	1.224.291.000.000	7.286.846.000.000	0,16
	2022	1.179.292.000.000	3.646.521.000.000	0,32
HMSP	2018	4.412.498.000.000	17.961.269.000.000	0,24
	2019	4.630.741.000.000	18.259.423.000.000	0,25
	2020	2.948.120.000.000	11.161.466.000.000	0,26
	2022	1.909.078.000.000	8.273.059.000.000	0,23
HOKI	2018	30.452.617.379	120.822.298.064	0,25
	2019	50.625.959.608	142.179.083.420	0,35
	2020	19.963.019.892	50.874.681.549	0,39
HRTA	2018	9.899.835.418	165.784.070.062	0,06
	2019	90.950.757.742	200.120.811.411	0,45
	2020	53.564.377.390	218.204.833.971	0,24
	2021	42.648.174.995	248.165.327.819	0,17
	2022	83.255.096.047	326.183.131.521	0,25
ICBP	2018	2.005.525.000.000	6.446.785.000.000	0,31
	2019	1.615.934.000.000	7.436.972.000.000	0,21
	2020	1.684.628.000.000	9.958.647.000.000	0,16
	2021	2.817.278.000.000	9.935.232.000.000	0,28
	2022	2.231.362.000.000	7.525.385.000.000	0,29
INDF	2018	3.460.973.000.000	7.446.966.000.000	0,46
	2019	2.361.672.000.000	8.749.397.000.000	0,27
	2020	2.784.615.000.000	12.426.334.000.000	0,22
	2021	3.577.269.000.000	14.456.085.000.000	0,24
	2022	3.775.947.000.000	12.318.765.000.000	0,30
KLBF	2018	838.106.813.718	3.306.399.669.021	0,25
	2019	839.509.478.376	3.402.616.824.533	0,24
	2020	602.524.461.985	3.627.632.574.744	0,16
	2021	967.557.071.735	4.143.264.634.774	0,23
	2022	1.165.196.790.019	4.458.896.905.350	0,26
MERK	2020	9.950.605.000	105.999.860.000	0,09
	2021	27.191.536.000	190.499.576.000	0,14
	2022	74.387.179.000	237.778.369.000	0,31
MLBI	2018	500.380.000.000	1.671.912.000.000	0,29
	2019	456.918.000.000	1.626.612.000.000	0,28
	2021	174.654.000.000	877.781.000.000	0,19
	2022	323.522.000.000	1.246.487.000.000	0,26
MYOR	2018	723.570.678.622	2.381.942.198.855	0,30

	2019	547.269.067.440	2.704.466.581.011	0,20
	2020	614.758.885.448	2.683.890.279.936	0,22
	2021	406.976.511.485	1.549.648.556.686	0,26
	2022	382.067.996.657	2.506.057.517.934	0,15
PEHA	2018	60.563.286.000	177.569.720.000	0,34
	2019	26.928.398.000	129.656.515.000	0,20
	2020	3.089.991.000	64.083.380.000	0,04
	2022	17.445.414.000	41.502.117.000	0,42
SCPI	2018	57.207.858.000	193.103.981.000	0,29
	2019	80.799.245.000	181.987.452.000	0,44
	2020	45.417.067.000	288.685.180.000	0,15
	2021	49.546.131.000	166.103.849.000	0,29
	2022	55.557.692.000	227.548.574.000	0,24
SIDO	2018	189.738.000.000	867.837.000.000	0,21
	2019	222.621.000.000	1.073.835.000.000	0,20
	2020	244.347.000.000	1.199.548.000.000	0,20
	2021	315.523.000.000	1.613.231.000.000	0,19
	2022	336.341.000.000	1.419.852.000.000	0,23
SKBM	2021	14.422.055.329	44.152.540.846	0,32
	2022	7.269.045.487	117.187.513.903	0,06
SKLT	2018	6.739.406.776	39.567.679.343	0,17
	2019	14.650.111.931	56.782.206.578	0,25
	2020	9.276.903.406	55.673.983.557	0,16
	2021	10.878.886.166	101.725.399.549	0,10
	2022	26.824.618.523	92.439.536.022	0,29
TSPC	2020	521.052.950.620	1.064.448.534.874	0,49
	2022	648.564.325.105	1.329.822.971.089	0,48
ULTJ	2018	291.922.000.000	949.018.000.000	0,30
	2019	278.947.000.000	1.375.359.000.000	0,20
	2020	321.089.000.000	1.421.517.000.000	0,22
	2021	331.696.000.000	1.541.932.000.000	0,21
	2022	427.799.000.000	1.288.998.000.000	0,33
UNVR	2018	2.340.586.000.000	12.148.087.000.000	0,19
	2019	3.120.471.000.000	9.901.772.000.000	0,31
	2020	1.693.036.000.000	9.206.869.000.000	0,18
	2021	1.848.151.000.000	7.496.592.000.000	0,24
	2022	1.759.317.000.000	6.993.803.000.000	0,25
WIIM	2018	19.922.311.606	70.730.637.719	0,28
	2019	14.976.706.662	42.874.167.628	0,34
	2020	14.115.264.412	215.214.468.586	0,06
	2021	59.915.239.649	214.884.126.122	0,27

	2022	40.103.992.594	319.471.051.042	0,12
WOOD	2018	88.236.564.069	324.612.407.710	0,27
	2019	107.814.934.562	284.050.164.117	0,38
	2020	67.033.593.419	433.714.455.615	0,15
	2021	131.917.900.206	704.423.183.701	0,18

## Lampiran 3. Data Komisaris Independen

<b>Kode</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Jumlah Seluruh Komisaris</b>	<b>INDEP</b>
ADES	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
BUDI	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
CAMP	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	2	0,50
CEKA	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
CLEO	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
COCO	2018	1	1	1,00
	2019	1	2	0,50
	2020	1	2	0,50
	2021	1	2	0,50
	2022	1	3	0,33
DLTA	2018	2	5	0,40
	2019	2	5	0,40

	2020	2	5	0,40
	2021	2	5	0,40
	2022	2	5	0,40
DVLA	2018	3	7	0,42
	2019	3	7	0,42
	2020	3	7	0,42
	2021	2	6	0,33
	2022	2	5	0,40
GGRM	2018	2	4	0,50
	2019	2	4	0,50
	2020	2	4	0,50
	2021	2	4	0,50
	2022	2	4	0,50
HMSP	2018	2	4	0,50
	2019	2	4	0,50
	2020	2	4	0,50
	2022	2	4	0,50
HOKI	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
HRTA	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
ICBP	2018	3	6	0,50
	2019	3	6	0,50
	2020	3	6	0,50
	2021	3	6	0,50
	2022	3	6	0,50
INDF	2018	3	8	0,37
	2019	3	8	0,37
	2020	3	8	0,37
	2021	3	8	0,37
	2022	3	8	0,37
KLBF	2018	2	6	0,33
	2019	3	7	0,42
	2020	3	7	0,42
	2021	3	7	0,42
	2022	3	7	0,42
MERK	2020	1	2	0,50

	2021	1	2	0,50
	2022	1	2	0,50
MLBI	2018	3	6	0,50
	2019	4	8	0,50
	2021	3	6	0,50
	2022	3	6	0,50
MYOR	2018	2	5	0,40
	2019	2	5	0,40
	2020	2	5	0,40
	2021	2	5	0,40
	2022	2	5	0,40
PEHA	2018	2	4	0,50
	2019	2	4	0,50
	2020	2	4	0,50
	2022	2	4	0,50
SCPI	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
SIDO	2018	2	5	0,40
	2019	2	5	0,40
	2020	3	6	0,50
	2021	3	6	0,50
	2022	3	6	0,50
SKBM	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
SKLT	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	1	3	0,33
TSPC	2020	3	5	0,60
	2022	3	5	0,60
ULTJ	2018	2	3	0,66
	2019	2	4	0,50
	2020	2	4	0,50
	2021	2	4	0,50
	2022	2	4	0,50
UNVR	2018	1	5	0,20
	2019	1	5	0,20



	2020	1	6	0,16
	2021	1	6	0,16
	2022	1	6	0,16
WIIM	2018	1	3	0,33
	2019	1	3	0,33
	2020	1	3	0,33
	2021	1	3	0,33
	2022	2	4	0,50
WOOD	2018	2	4	0,50
	2019	2	4	0,50
	2020	2	4	0,50
	2021	2	4	0,50

## Lampiran 4. Data Karakter Eksekutif

<b>Kode</b>	<b>Tahun</b>	<b>EBIT</b>	<b>Total Aset</b>	<b>RISK</b>
ADES	2018	91.122.000.000	881.275.000.000	0,10
	2019	120.718.000.000	822.375.000.000	0,14
	2020	161.962.000.000	958.791.000.000	0,16
	2021	328.221.000.000	1.304.108.000.000	0,25
	2022	452.537.000.000	1.645.582.000.000	0,27
BUDI	2018	193.931.000.000	3.392.980.000.000	0,05
	2019	231.778.000.000	2.999.767.000.000	0,07
	2020	197.235.000.000	2.963.007.000.000	0,06
	2021	222.715.000.000	2.993.218.000.000	0,07
	2022	222.973.000.000	3.173.651.000.000	0,07
CAMP	2018	86.811.786.458	1.004.275.813.783	0,08
	2019	90.901.916.541	1.057.529.235.986	0,08
	2020	48.759.784.747	1.086.873.666.641	0,04
	2021	118.449.234.899	1.147.260.611.703	0,10
	2022	147.206.245.389	1.074.777.460.412	0,13
CEKA	2018	136.839.635.762	1.168.956.042.706	0,11
	2019	274.640.420.999	1.393.079.542.074	0,19
	2020	207.543.083.141	1.566.673.828.068	0,13
	2021	227.163.546.573	1.697.387.196.209	0,13
	2022	282.224.281.647	1.718.287.453.575	0,16
CLEO	2018	108.042.128.872	833.933.861.594	0,13
	2019	205.768.914.930	1.245.144.303.719	0,16
	2020	213.024.104.210	1.310.940.121.622	0,16
	2021	261.608.182.455	1.348.181.576.913	0,19
	2022	292.664.475.389	1.693.523.611.414	0,17

COCO	2018	15.666.517.069	162.749.739.566	0,09
	2019	23.454.240.953	250.442.587.742	0,09
	2020	16.085.021.916	263.754.414.443	0,06
	2021	24.873.612.788	370.684.311.428	0,06
	2022	21.957.861.992	485.054.412.584	0,04
DLTA	2018	396.592.266.000	1.523.517.170.000	0,26
	2019	361.848.049.000	1.425.983.722.000	0,25
	2020	132.036.426.000	1.225.580.913.000	0,10
	2021	269.772.032.000	1.308.722.065.000	0,20
	2022	225.624.490.000	1.307.186.367.000	0,17
DVLA	2018	267.309.717.000	1.682.821.739.000	0,15
	2019	296.623.723.000	1.829.960.714.000	0,16
	2020	210.716.106.000	1.986.711.872.000	0,10
	2021	208.602.035.000	2.085.904.980.000	0,10
	2022	198.347.376.000	2.009.139.485.000	0,09
GGRM	2018	11.156.804.000.000	69.097.219.000.000	0,16
	2019	15.073.090.000.000	78.647.274.000.000	0,19
	2020	10.045.855.000.000	78.191.409.000.000	0,12
	2021	7.361.765.000.000	89.964.369.000.000	0,08
	2022	3.908.926.000.000	88.562.617.000.000	0,04
HMSP	2018	8.608.863.000.000	46.602.420.000.000	0,18
	2019	9.045.894.000.000	50.902.806.000.000	0,17
	2020	10.357.957.000.000	49.674.030.000.000	0,20
	2022	7.597.095.000.000	54.786.992.000.000	0,13
HOKI	2018	128.846.079.052	758.846.556.031	0,17
	2019	159.504.296.665	848.676.035.300	0,18
	2020	68.752.287.446	906.924.214.166	0,07
HRTA	2018	207.860.715.787	1.537.031.552.479	0,13
	2019	258.000.079.124	2.311.190.054.987	0,11
	2020	356.084.265.232	2.830.686.417.461	0,12
	2021	425.725.484.406	3.478.074.220.547	0,12
	2022	548.097.539.921	3.849.086.552.639	0,14
ICBP	2018	6.447.921.000.000	34.367.153.000.000	0,18
	2019	7.400.117.000.000	38.709.314.000.000	0,19
	2020	9.201.012.000.000	103.588.325.000.000	0,08
	2021	11.658.711.000.000	118.066.628.000.000	0,09
	2022	13.377.646.000.000	115.305.536.000.000	0,11
INDF	2018	9.143.020.000.000	96.537.796.000.000	0,09
	2019	9.831.024.000.000	96.198.559.000.000	0,10
	2020	12.889.087.000.000	163.136.516.000.000	0,07
	2021	16.882.324.000.000	179.356.193.000.000	0,09

	2022	19.693.110.000.000	180.433.300.000.000	0,10
KLBF	2018	3.378.474.800.619	18.146.206.145.369	0,18
	2019	3.586.618.563.484	20.264.726.862.584	0,17
	2020	3.543.955.221.722	22.564.300.317.374	0,15
	2021	4.009.787.141.562	25.666.635.156.271	0,15
	2022	4.395.630.652.190	27.241.313.025.674	0,16
MERK	2020	108.533.576.000	929.901.046.000	0,11
	2021	191.526.449.000	1.026.266.866.000	0,18
	2022	239.074.089.000	1.037.647.240.000	0,23
MLBI	2018	555.254.000.000	2.889.501.000.000	0,19
	2019	640.460.000.000	2.896.950.000.000	0,22
	2021	470.945.000.000	2.922.017.000.000	0,16
	2022	666.307.000.000	3.374.502.000.000	0,19
MYOR	2018	2.627.892.008.006	17.591.706.426.634	0,14
	2019	3.172.264.551.034	19.037.918.806.473	0,16
	2020	2.830.928.194.155	19.777.500.514.550	0,14
	2021	1.772.315.914.155	19.917.653.265.528	0,08
	2022	2.433.114.641.701	22.276.160.695.411	0,10
PEHA	2018	193.710.612.000	1.868.663.546.000	0,10
	2019	171.574.384.000	2.096.719.180.000	0,08
	2020	89.796.909.000	1.915.989.375.000	0,04
	2022	101.031.299.000	1.806.280.965.000	0,05
SCPI	2018	238.236.075.000	1.635.702.779.000	0,14
	2019	138.396.051.000	1.417.704.185.000	0,09
	2020	273.253.745.000	1.598.281.523.000	0,17
	2021	156.614.605.000	1.212.160.543.000	0,12
	2022	218.304.019.000	1.361.427.269.000	0,16
SIDO	2018	824.331.000.000	3.337.628.000.000	0,24
	2019	1.024.244.000.000	3.529.557.000.000	0,29
	2020	1.151.025.000.000	3.849.516.000.000	0,29
	2021	998.691.000.000	4.068.970.000.000	0,24
	2022	809.630.000.000	4.081.442.000.000	0,19
SKBM	2021	84.814.486.135	1.970.428.120.056	0,04
	2022	154.981.710.643	2.042.199.577.083	0,07
SKLT	2018	54.165.842.691	747.293.725.435	0,07
	2019	81.239.621.435	790.845.543.826	0,10
	2020	74.743.954.513	773.863.042.440	0,09
	2021	98.274.666.568	889.125.250.792	0,11
	2022	88.162.274.818	1.033.289.474.829	0,08
TSPC	2020	1.075.647.164.253	9.104.657.533.366	0,11
	2022	728.658.047.174	11.328.974.079.150	0,06

ULTJ	2018	892.565.000.000	5.555.871.000.000	0,16
	2019	1.264.394.000.000	6.608.422.000.000	0,19
	2020	1.364.261.000.000	8.754.116.000.000	0,15
	2021	1.627.958.000.000	7.406.856.000.000	0,22
	2022	1.302.854.000.000	7.376.375.000.000	0,17
UNVR	2018	3.925.110.000.000	20.326.869.000.000	0,19
	2019	3.861.481.000.000	20.649.371.000.000	0,18
	2020	4.357.209.000.000	20.534.632.000.000	0,21
	2021	4.084.012.000.000	19.068.532.000.000	0,21
	2022	3.544.052.000.000	18.318.114.000.000	0,19
WIIM	2018	52.186.278.119	1.255.573.914.558	0,04
	2019	28.648.240.061	1.299.521.608.556	0,02
	2020	204.870.820.883	1.614.442.007.528	0,12
	2021	201.373.700.657	1.891.169.731.202	0,10
	2022	305.881.637.559	2.168.793.843.296	0,14
WOOD	2018	473.426.924.586	4.588.497.407.410	0,10
	2019	490.376.708.656	5.348.826.322.351	0,09
	2020	641.919.621.668	5.856.758.922.140	0,11
	2021	960.953.021.507	6.801.034.778.630	0,14

## Lampiran 5. Data Kepemilikan Institusional

Kode	Tahun	Saham Institusional	Saham Beredar	KEI
ADES	2018	539.896.713	589.896.800	0,91
	2019	539.896.713	589.896.800	0,91
	2020	539.896.713	589.896.800	0,91
	2021	539.896.713	589.896.800	0,91
	2022	539.896.713	589.896.800	0,91
BUDI	2018	2.402.568.831	4.498.997.362	0,53
	2019	2.602.568.831	4.498.997.362	0,57
	2020	2.602.568.831	4.498.997.362	0,57
	2021	2.602.568.831	4.498.997.362	0,57
	2022	2.688.568.831	4.498.997.362	0,59
CAMP	2018	5.000.000.000	5.885.000.000	0,85
	2019	5.000.000.000	5.885.000.000	0,85
	2020	5.000.000.000	5.885.000.000	0,85
	2021	5.000.000.000	5.885.000.000	0,85
	2022	5.000.000.000	5.885.000.000	0,85
CEKA	2018	551.971.000	595.000.000	0,92
	2019	547.471.000	595.000.000	0,92
	2020	547.261.000	595.000.000	0,92

	2021	547.379.200	595.000.000	0,92
	2022	518.021.000	595.000.000	0,87
CLEO	2018	9.750.000.000	12.000.000.000	0,81
	2019	9.750.000.000	12.000.000.000	0,81
	2020	9.764.900.000	11.993.500.000	0,81
	2021	9.764.900.000	11.959.987.600	0,81
	2022	9.225.600.000	11.959.987.600	0,77
COCO	2018	340.000.000	340.000.000	1,00
	2019	340.000.000	560.242.105	0,60
	2020	297.602.173	560.284.938	0,53
	2021	378.980.123	889.863.981	0,42
	2022	592.106.387	889.863.981	0,66
DLTA	2018	653.907.150	800.659.050	0,81
	2019	677.261.850	800.659.050	0,84
	2020	677.261.850	800.659.050	0,84
	2021	677.261.850	800.659.050	0,84
	2022	677.261.850	800.659.050	0,84
DVLA	2018	1.031.800.912	1.115.946.100	0,92
	2019	1.031.800.912	1.118.755.400	0,92
	2020	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92
	2021	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92
	2022	1.031.800.912	1.120.000.000	0,92
GGRM	2018	1.878.332.843	1.924.088.000	0,97
	2019	1.878.332.843	1.924.088.000	0,97
	2020	1.466.536.430	1.924.088.000	0,76
	2021	1.466.536.430	1.924.088.000	0,76
	2022	1.466.536.430	1.924.088.000	0,76
HMSP	2018	107.594.221.125	116.318.076.900	0,92
	2019	107.594.221.125	116.318.076.900	0,92
	2020	107.594.221.125	116.318.076.900	0,92
	2022	107.594.221.125	116.318.076.900	0,92
HOKI	2018	1.654.288.900	2.374.834.620	0,69
	2019	1.654.288.900	2.378.405.500	0,69
	2020	1.654.388.900	2.419.438.170	0,68
HRTA	2018	3.741.762.600	4.605.262.400	0,81
	2019	3.523.991.500	4.605.262.400	0,76
	2020	3.588.139.800	4.605.262.400	0,77
	2021	3.589.371.700	4.605.262.400	0,77
	2022	3.589.371.700	4.605.262.400	0,77
ICBP	2018	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80
	2019	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80

	2020	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80
	2021	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80
	2022	9.391.678.000	11.661.908.000	0,80
INDF	2018	4.397.483.470	8.780.426.500	0,50
	2019	4.397.483.470	8.780.426.500	0,50
	2020	4.397.483.470	8.780.426.500	0,50
	2021	4.397.483.470	8.780.426.500	0,50
	2022	4.397.483.470	8.780.426.500	0,50
KLBF	2018	26.702.830.685	46.875.122.110	0,57
	2019	26.702.830.685	46.875.122.110	0,57
	2020	26.751.692.485	46.872.947.110	0,57
	2021	27.148.327.585	46.872.947.110	0,57
	2022	27.182.158.685	46.255.641.410	0,58
MERK	2020	388.194.920	448.000.000	0,86
	2021	388.194.920	448.000.000	0,86
	2022	388.194.920	448.000.000	0,86
MLBI	2018	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81
	2019	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81
	2021	1.723.151.000	2.107.000.000	0,81
	2022	1.881.951.000	2.107.000.000	0,89
MYOR	2018	18.846.305.825	22.358.699.725	0,84
	2019	18.846.305.825	22.358.699.725	0,84
	2020	18.846.305.825	22.358.699.725	0,84
	2021	18.851.249.125	22.358.699.725	0,84
	2022	18.851.249.126	22.358.699.726	0,84
PEHA	2018	811.451.566	840.000.000	0,96
	2019	811.451.566	840.000.000	0,96
	2020	554.435.610	840.000.000	0,66
	2022	561.548.910	840.000.000	0,66
SCPI	2018	3.542.636	3.600.000	0,98
	2019	3.542.636	3.600.000	0,98
	2020	3.556.336	3.600.000	0,98
	2021	3.556.336	3.600.000	0,98
	2022	3.556.336	3.600.000	0,98
SIDO	2018	12.150.000.000	14.884.360.900	0,81
	2019	12.150.000.000	14.884.360.900	0,81
	2020	24.300.000.000	29.770.221.800	0,81
	2021	24.481.453.060	29.995.485.529	0,81
	2022	23.282.732.460	30.000.000.000	0,77
SKBM	2021	1.199.564.753	1.730.103.217	0,69
	2022	1.302.710.586	1.730.103.217	0,75

SKLT	2018	586.302.044	621.666.450	0,94
	2019	586.302.044	621.666.450	0,94
	2020	586.302.044	621.666.450	0,94
	2021	478.979.108	621.675.350	0,77
	2022	476.750.330	621.695.950	0,76
TSPC	2020	3.674.161.618	4.500.000.000	0,81
	2022	3.773.630.518	4.509.864.300	0,83
ULTJ	2018	8.161.287.160	11.553.528.000	0,70
	2019	8.364.251.720	11.553.528.000	0,72
	2020	8.037.938.620	10.398.175.200	0,77
	2021	8.071.269.220	10.398.175.200	0,77
	2022	8.104.831.620	10.398.175.200	0,77
UNVR	2018	6.484.877.500	7.630.000.000	0,85
	2019	6.484.877.500	7.630.000.000	0,85
	2020	32.424.387.500	38.150.000.000	0,85
	2021	32.424.387.500	38.150.000.000	0,85
	2022	32.424.387.500	38.150.000.000	0,85
WIIM	2018	1.415.935.117	2.099.873.760	0,67
	2019	1.406.976.517	2.099.873.760	0,67
	2020	1.317.335.117	2.099.873.760	0,62
	2021	1.325.986.517	2.099.873.760	0,63
	2022	1.325.986.517	2.071.973.760	0,64
WOOD	2018	4.686.375.007	6.306.250.000	0,74
	2019	4.686.375.007	6.306.250.000	0,74
	2020	4.533.015.920	6.306.250.000	0,71
	2021	4.573.835.000	6.362.500.000	0,71

Lampiran 6. Data Perbandingan Karakter Eksekutif

Kode	Tahun	Risk	Hasil Perbandingan
ADES	2018	0,10	0
	2019	0,14	1
	2020	0,16	1
	2021	0,25	1
	2022	0,27	1
BUDI	2018	0,05	0
	2019	0,07	0
	2020	0,06	0
	2021	0,07	0
	2022	0,07	0
CAMP	2018	0,08	0

	2019	0,08	0
	2020	0,04	0
	2021	0,10	0
	2022	0,13	1
CEKA	2018	0,11	0
	2019	0,19	1
	2020	0,13	1
	2021	0,13	1
	2022	0,16	1
CLEO	2018	0,13	1
	2019	0,16	1
	2020	0,16	1
	2021	0,19	1
	2022	0,17	1
COCO	2018	0,09	0
	2019	0,09	0
	2020	0,06	0
	2021	0,06	0
	2022	0,04	0
DLTA	2018	0,26	1
	2019	0,25	1
	2020	0,10	0
	2021	0,20	1
	2022	0,17	1
DVLA	2018	0,15	1
	2019	0,16	1
	2020	0,10	0
	2021	0,10	0
	2022	0,09	0
GGRM	2018	0,16	1
	2019	0,19	1
	2020	0,12	0
	2021	0,08	0
	2022	0,04	0
HMSP	2018	0,18	1
	2019	0,17	1
	2020	0,20	1
	2022	0,13	1
HOKI	2018	0,17	1
	2019	0,18	1
	2020	0,07	0



HRTA	2018	0,13	1
	2019	0,11	0
	2020	0,12	0
	2021	0,12	0
	2022	0,14	1
ICBP	2018	0,18	1
	2019	0,19	1
	2020	0,08	0
	2021	0,09	0
	2022	0,11	0
INDF	2018	0,09	0
	2019	0,10	0
	2020	0,07	0
	2021	0,09	0
	2022	0,10	0
KLBF	2018	0,18	1
	2019	0,17	1
	2020	0,15	1
	2021	0,15	1
	2022	0,16	1
MERK	2020	0,11	0
	2021	0,18	1
	2022	0,23	1
MLBI	2018	0,19	1
	2019	0,22	1
	2021	0,16	1
	2022	0,19	1
MYOR	2018	0,14	1
	2019	0,16	1
	2020	0,14	1
	2021	0,08	0
	2022	0,10	0
PEHA	2018	0,10	0
	2019	0,08	0
	2020	0,04	0
	2022	0,05	0
SCPI	2018	0,14	1
	2019	0,09	0
	2020	0,17	1
	2021	0,12	0
	2022	0,16	1

SIDO	2018	0,24	1
	2019	0,29	1
	2020	0,29	1
	2021	0,24	1
	2022	0,19	1
SKBM	2021	0,04	0
	2022	0,07	0
SKLT	2018	0,07	0
	2019	0,10	0
	2020	0,09	0
	2021	0,11	1
	2022	0,08	0
TSPC	2020	0,11	1
	2022	0,06	0
ULTJ	2018	0,16	1
	2019	0,19	1
	2020	0,15	1
	2021	0,22	1
	2022	0,17	1
UNVR	2018	0,19	1
	2019	0,18	1
	2020	0,21	1
	2021	0,21	1
	2022	0,19	1
WIIM	2018	0,04	0
	2019	0,02	0
	2020	0,12	0
	2021	0,10	0
	2022	0,14	1
WOOD	2018	0,10	0
	2019	0,09	0
	2020	0,11	0
	2021	0,14	1

Keterangan:

Rata-rata = 0,13

Nilai 1 (*Risk Taker*) = 68

Nilai 0 (*Risk Averse*) = 58

Lampiran 7. Data Outlier

<b>Kode</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris Independen</b>	<b>Karakter Eksekutif</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>	<b>Penghindaran Pajak</b>
HMSP	2021	0,50	0,16	0,92	0,69
HOKI	2021	0,33	0,04	0,68	0,63
	2022	0,33	0,03	0,68	15,9
MERK	2018	0,50	0,04	0,87	1,36
	2019	0,50	0,14	0,87	2,92
MLBI	2020	0,50	0,15	0,82	0,62
PEHA	2021	0,50	0,05	0,66	1,34
SKBM	2018	0,33	0,03	0,85	0,52
	2019	0,33	0,02	0,85	2,30
	2020	0,33	0,03	0,85	0,85
TSPC	2018	0,60	0,09	0,85	0,72
	2019	0,60	0,10	0,80	0,76
	2021	0,60	0,11	0,82	0,60
WOOD	2022	0,33	0,06	0,73	0,94

## Lampiran 8. Output SPSS

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komisaris Independen	126	.166	1.000	.40747	.105561
Karakter Eksekutif	126	.022	.299	.13878	.058059
Kepemilikan Institusional	126	.425	1.000	.79120	.132503
Penghindaran Pajak	126	.048	.489	.24266	.092490
Valid N (listwise)	126				

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.33152810
Most Extreme Differences	Absolute	.328
	Positive	.328
	Negative	-.297
Test Statistic		.328
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		126
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08844350
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.062
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Komisaris Independen	.999	1.001
	Karakter Eksekutif	.898	1.114
	Kepemilikan Institusional	.897	1.115

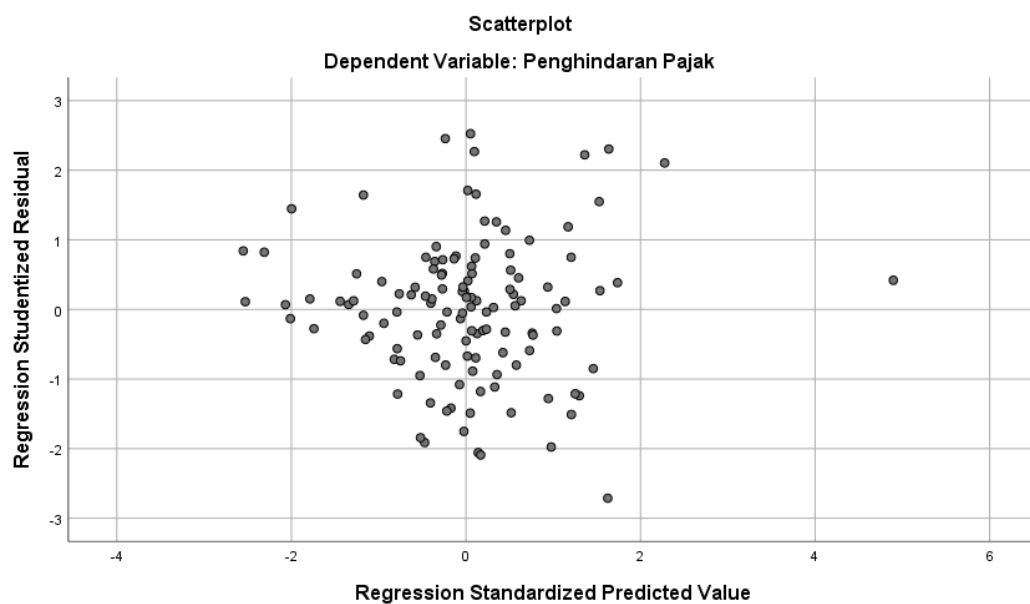
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.293 <sup>a</sup>	.086	.063	.08952	1.861

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak



### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.092	3	.031	3.807	.012 <sup>b</sup>
	Residual	.978	122	.008		
	Total	1.069	125			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.191	.057		3.349	.001
	Komisaris Independen	.194	.076	.221	2.552	.012
	Karakter Eksekutif	-.313	.146	-.197	-2.154	.033
	Kepemilikan Institusional	.021	.064	.030	.331	.741

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak